

PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN



2022

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)

KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. LKIP BKAD Kabupaten Tapin merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BKAD Kabupaten Tapin kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang ditetapkan adalah “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”.

Dijabarkan menjadi 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung SDM yang berkualitas;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan dan taat azas;
4. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta memuat unsur-unsur perencanaan strategi, evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Rantau, Februari 2023

Ht. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin



Haris Fadhilah, SE, MM

Pembina

NIP. 19740626 200501 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator sasaran pada BKAD khususnya indikator kinerja utama mempunyai 5 (lima) indikator yaitu :

1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
4. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)
5. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib sesuai ketentuan

Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Pengukuran kinerja tersebut termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD. IKU tersebut dapat kita jabarkan pada tabel berikut :

CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKAD KAB. TAPIN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%	272,42%
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	97	83,51%	86,09%

		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	98,08%	98,08%

Tahun 2022 BKAD Kabupaten Tapin melaksanakan 3 program dengan 11 kegiatan dan 57 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sampai dengan setelah perubahan Rp.14.994.753.143,00. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.13.746.725.837,00,- dengan capaian 91,68%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang terlaksana karena terkendala waktu, atau peraturan dan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran namun semua kendala tersebut tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Tapin tahun 2022 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan dalam menilai pencapaian kinerja BKAD Kabupaten Tapin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini ada kekurangan yang selalu kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di BKAD Kabupaten Tapin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, dan Tupoksi	1
C. Isu Strategis.....	12
D. Landasan Hukum	13
E. Tindak Lanjut LHE Tahun 2020	14
F. Sistematika Laporan.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	56
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP BKAD Tahun 2020	14
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD	21
Tabel Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2022	23
Tabel Capaian atas IKU BKAD Tahun 2022	30
Tabel Rekapitulasi capaian IKU BKAD Tahun 2022	43
Tabel Rekapitulasi perbandingan realisasi dan capaian kinerja TA 2020-2022	44
Tabel Rekapitulasi perbandingan realisasi kinerja TA 2022 dengan target – jangka menengah	45
Tabel Pagu anggaran dan realisasi anggaran BKAD TA 2022	56

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

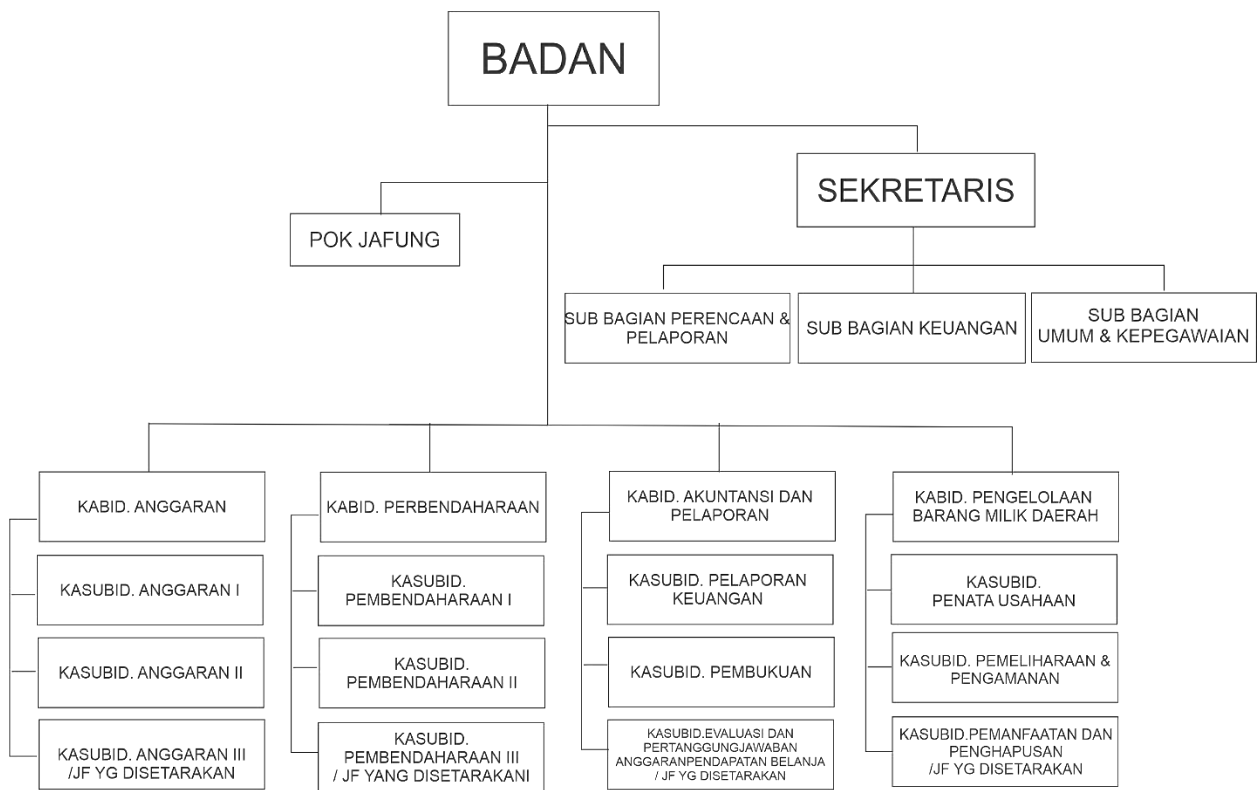
1. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :



Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
5. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
7. pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (Akuntansi) pengeluaran kas daerah;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
9. Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Subbidang Anggran I;
 - b. Subbidang Anggaran II; dan
 - c. Subbidang Anggaran III;
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan III;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pembukuan;
 - b. Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Bidang Aset dan Investasi;
 - a. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan;
 - b. Subbidang Penatausahaan; dan
 - c. Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Badan

Memimpin Badan dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan serta Tertib Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan dan Rencana Kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang, Sekretariat dan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk mensinkronkan pelaksanaan program / kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan Juknis penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier pegawai ;
- 6) Menetapkan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi program / kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 7) Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebijakan teknis Bupati dan RPJMD sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 8) Menetapkan data dan informasi pelaksanaan urusan, program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penetapan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 9) Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- 10) Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk diajukan ke DPRD Kab. Tapin dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Tapin;
- 11) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai prosedur

- dan perundangan yang berlaku untuk peningkatan dan tertib pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 12) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai perundangan yang berlaku dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Tapin;
 - 13) Melaksanakan pengelolaan aset dan investasi daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku tertib administrasi pengelolaan aset dan investasi daerah;
 - 14) Melaksanakan pembinaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien;
 - 15) Menetapkan Keputusan, Rekomendasi/Edaran Bupati berkenaan dengan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 16) Menetapkan naskah dinas (Surat keluar, Telaahan Staf, Surat Tugas, dll) berkenaan dengan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan dan umum, serta pelaksanaan kegiatan pada Bidang-Bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 17) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan di bidang Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - 18) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
 - 19) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai anggaran.

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- 2) Menyusun analisa standar belanja;
- 3) Menyusun standar harga satuan;
- 4) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancanangan APBD;
- 5) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD;
- 6) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD;
- 7) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 8) Menyusun anggaran kas;
- 9) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 10) Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 11) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Subbidang Anggaran I
2. Subbidang Anggaran II, dan
3. Subbidang Anggaran III

4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dan pengelolaan kas umum daerah.

Uraian tugas Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun anggaran kas;
- 2) Merumuskan rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 3) Mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dari SKPD;
- 4) Menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 5) Merumuskan kebijakan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pengelolaan investasi daerah;
- 6) Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 7) Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan;
- 9) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan APBD;
- 10) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 11) Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 12) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Sub Bidang Perbendaharaan II, dan
3. Sub Bidang Perbendaharaan III

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan daerah serta pelaporannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Uraian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja Bidang Akuntansi berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan program kerja Bidang Akuntansi tahun lalu sebagai pedoman kerja ;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi / Unit Kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Merumuskan Laporan Realisasi Semester Pertama Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
- 4) Merumuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
- 5) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
- 6) Merumuskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
- 7) Melaksanakan penyajian informasi keuangan daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib dan akurasi informasi keuangan daerah;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
3. Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pengelolaan Aset Daerah dan Investasi Daerah.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat pedoman pengelolaan aset/ barang milik daerah;
- 2) Melakukan penatausahaan aset/ barang milik daerah;
- 3) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan aset daerah;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- 5) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 6) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam rangka menghimpun dan mengolah data aset daerah;
- 8) Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 9) Membuat pedoman pelaksanaan penyertaan modal dan investasi daerah;
- 10) Melaksanakan penyertaan modal dan investasi atas nama pemerintah daerah;
- 11) Menyimpan dokumen/ surat berharga investasi daerah;
- 12) Melaksanakan koordinasi dalam rangka menghimpun data-data penyertaan modal, investasi dan aset daerah;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan
2. Sub Bidang Penatausahaan Aset
3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

2. Sumber Daya Pada BKAD

Jumlah ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang.

Dari jumlah ASN tersebut di atas, yang telah menduduki jabatan sebanyak 15 (Lima Belas) orang, terdiri dari 1 (Satu) orang eselon II/b; ,1 (Satu) orang eselon III/a, 4 (empat) orang eselon III/b; 9 (sembilan) orang eselon IV/a.

Keadaan pegawai pada BKAD Kab.Tapin pada tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

a) Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda / Ivc	-
2.	Pembina Tk.I / IVb	1
3.	Pembina / IVa	3
4.	Penata Tk.I / III d	8
5.	Penata / III c	7
6.	Penata Muda Tk.I / III b	4

7.	Penata Muda / IIIa	4
8.	Pengatur Tk.I / IId	3
9.	Pengatur / IIc	2
10.	Pengatur Muda Tk.I / IIb	-
11.	Pengatur Muda / IIa	-
12.	Juru Tk.I / Id	-
JUMLAH		32

b) Jumlah Pejabat

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II.B	1
2.	Eselon III.A	1
3.	Eselon III.B	4
4.	Eselon IV.A	9
JUMLAH		15

c) Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Doktoral	1
2.	Pasca Sarjana/ S2	8
3.	Sarjana/ S1	17
4.	Diploma / D3	4
5.	SLTA	2
JUMLAH		32

2. Pendidikan Struktural :

NO	JENIS DIKLAT PIM	JUMLAH
1.	PIM II	1
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	5
JUMLAH		7

d) Rasio Struktur Jabatan dan Eselonring yang Terisi

Rasio struktur jabatan dan eselonring yang terisi adalah perbandingan antara jumlah jabatan/eselon yang ada dengan jumlah pejabat eselon yang

telah mengisi jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut :

Daftar Jumlah Jabatan/eselon yang ada pada BKAD Kabupaten Tapin

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1	Kepala Badan	II/b
2	Sekretaris	III/a
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	-
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IV/a
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a
6	Kepala Bidang Anggaran	III/b
7	Kepala Sub Bidang Anggaran I	IV/a
8	Kepala Sub Bidang Anggaran II	IV/a
9	Kepala Sub Bidang Anggaran III	-
10	Kepala Bidang Perbendaharaan	III/b
11	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I	IV/a
12	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II	IV/a
13	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III	-
14	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	III/b
15	Kepala Sub Bidang Pembukuan	IV/a
16	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan	-
17	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD	-
18	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	III/b
19	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan	-
20	Kepala Sub Bidang Penatausahaan	IV/a
21	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan	IV/a

Dari tabel yang tersebut di atas maka dapat kita lihat rasio struktur jabatan dan eselonoring yang terisi adalah mencapai 71,43 persen, karena jumlah jabatan yang ada terisi hanya sebanyak 15 jabatan. Sebanyak 6 jabatan tidak terisi, 1 jabatan yaitu Kasubag Keuangan kosong karena

pejabatnya di promosi menjadi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, 1 jabatan yaitu Kasubid Pelaporan Keuangan kosong karena pejabat nya di prosmosi menjadi Kepala Bidang Anggaran, sedangkan 4 jabatan lain yaitu Kasubid Anggaran III, Kasubid Perbendaharaan III, Kasubid Evaluasi Pertanggungjawaban APBD, dan Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan pejabatnya di fungsional kan.

C. ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu-isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program BKAD Kabupaten Tapin serta Renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih serta kebijakan dalam jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2018 -2023.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Tapin yang harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin serta adanya faktor internal, faktor eksternal dan mempertimbangkan metode SWOT maka rumusan isu strategis BKAD Kabupaten sebagai berikut :

1. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku
2. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kab. Tapin
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi / verifikasi dalam memeriksa / memverifikasi Dokumen RKA-SKPD
4. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Masih tidak berjalannya revolving uang persediaan (UP) di beberapa SKPD
6. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola kas daerah, bendahara

pengeluaran SKPD dan Bank

7. Terhambatnya transfer dana bantuan keuangan dari Provinsi dan Pusat dikarenakan proses pencairan harus melalui dinas teknis yang harus sinergis antara dinas teknis kabupaten dengan provinsi maupun pusat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sedangkan kegiatan sudah berjalan.
8. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik dan cepat.
9. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Tapin yang belum mempunyai dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah
10. Belum tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah ditingkat SKPD
11. Masih rendahnya pemahaman aparatur pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

E. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2020

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BKAD Tahun 2020

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar Rencana Kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan	Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

	anggaran	(Bab III)
2	Agar Mengembangkan dan Menggunakan Teknologi informasi untuk mengukur kinerja	Pengembangan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja menggunakan instrumen dari kabupaten yaitu esakip.tapinkab.go.id
3	Laporan Kinerja agar memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasikan	Telah dimuat informasi efisiensi sumber daya (Bab III)
4	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan telah didokumentasikan (Bab III)

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tahun 2022 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2022 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BKAD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV : Penutup

Pada bab ini digunakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapin merupakan rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan pada BKAD Kabupaten Tapin. Maka dalam rencana strategis itu dimuat visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran BKAD Kabupaten Tapin. Visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Tapin. Berikut ini visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran BKAD Kabupaten Tapin.

1. Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”

Penjelasan Makna Visi

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan tertib apabila memenuhi kriteria tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan transparan apabila menganut prinsip keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan akuntabel apabila dilakukan dengan terukur baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas serta pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan lancar;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten;
4. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang berkualitas;
5. Mewujudkan penyusunan APBD yang tepat waktu;
6. Mewujudkan pelayanan yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku ;
dan
8. Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

3. Tujuan, Sasaran Srategis, Indikator Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan Jangka Menengah BKAD Kabupaten Tapin sesuai dengan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin yaitu : **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** hal ini sangat sejalan dengan visi BKAD yaitu **“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”**.

Adapun indikator tujuan Jangka Menengah BKAD Kabupaten Tapin yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin adalah “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin (Predikat) “.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu pencapaian sasaran. Indikator sasaran pada BKAD khususnya indikator kinerja utama mempunyai 5 (lima) indikator yaitu:

1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)
3. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
5. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib sesuai ketentuan

Tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	2	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
			Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan

Strategi dan Arah Kebijakan BKAD berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	1	Melaksanakan Desk antara SKPD dengan Tim Anggaran pada Saat Penyusunan Rancangan KUA PPAS
		2	Melakukan Penelaahan usulan anggaran terhadap tujuan kegiatan yang ingin dicapai SKPD
2	Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah	1	Melaksanakan kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan daerah
3	Peningkatan SAKIP	1	Penerapan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan kaidah yang berlaku pada SAKIP
4	Optimalisasi kordinasi dengan semua unsur terkait dalam menunjang proses penganggaran yang tepat waktu	1	Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal
1	Peningkatan sistem pengelolaan barang milik daerah	1	Melaksanakan peningkatan kualitas sdm dalam pengelolaan keuangan daerah
		2	Penerapan SIMDA BMD untuk pengelolaan aset yang lebih optimal

4. Indikator Kinerja Utama

Menurut Permenpan No.9 Tahun 2007 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi SKPD BKAD sangat penting. Karena dari IKU itu dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik disamping itu juga sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD dapat dilihat sebagai berikut:

No	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja 2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des) 3. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir) 4. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D 	<p>Makna :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Substansi, relevansi, dan konsistensi anggaran belanja sesuai kinerja yang ingin dicapai SKPD b. Menurut Peraturan Paliang Lambat Tanggal 31 Des Sebelum TA Berjalan c. Menurut Peraturan Paling Lambat 3 Bulan setelah TA Berakhir d. Memberikan Pelayanan yang Prima (Hasil dari kuesioner SKPD) <p>Alasan : Merupakan Tupoksi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin</p> <p>Rumus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 31 Desember sebelum TA Berjalan b. Tanggal 31 Maret setelah TA Berjalan c. Hasil Kuisisioner dari SKPD 	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kab.Tapin	<p>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</p> <p>Bidang Anggaran</p> <p>Bidang Perbendaharaan</p>
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan	<p>Makna :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang Milik Daerah Pemkab.Tapin yang tercatat b. Barang Milik Daerah Pemkab.Tapin yang digunakan, dimanfaatkan, dan dihapus 	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kab.Tapin	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

			<p>c. Usulan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab.Tapin yang terverifikasi</p> <p>Alasan : Merupakan tupoksi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin</p> <p>Rumus :</p> <p>a. (Nilai BMD yang tercatat/Jumlah BMD yang dimiliki) x 100%</p> <p>b. (Nilai BMD yang digunakan / Jumlah BMD yang dimiliki) x 100%</p> <p>c. Nilai BMD yang dihapus/Jumlah BMD yang rusak berat) x 100%</p> <p>d. (Jumlah usulan BMD yang terverifikasi/Jumlah BMD yang diusulkan) x 100%</p>		
--	--	--	--	--	--

B. Perjanjian Kinerja BKAD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan maka perlu adanya perencanaan kinerja. Hal ini di harapkan dengan adanya perencanaan kinerja tersebut BKAD Kabupaten Tapin dapat menyiapkan langkah dan keputusan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.untuk mewujudkan rencana tersebut maka BKAD Kabupaten telah menyiapkan perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada BKAD Kaupaten Tapin..

BKAD Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2022, karena dalam dalam perjanjian ini terdapat kinerja utama, indikator kinerja serta target yang ditetapkan BKAD dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2022

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Eselon 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%
			Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	97%	83,51%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100%	98,08%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
		Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%
3	Eselon 3 (Anggaran)	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%
4	Eselon 3 (Akuntansi)	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD (sesuai SAP dan berbasis akrual)	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%
5	Eselon 3 (Perbendaharaan)	Meningkatkan kualitas pelayanan pencairan dana SKPD lingkup	Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti	100%	100%

		Pemkab Tapin			
6	Eselon 3 (Pengelolaan BMD)	Pengelolaan barang milik daerah Pemkab Tapin yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100%	100%
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%	92,30%
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%	100%
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100%	100%
7	Eselon 4 (Sekretariat)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	100%	100%
		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD (dokumen)	14 dokumen	14 dokumen
		Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan
		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen
8	Eselon 4 (Anggaran)	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan regulasi tentang penganggaran	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen

		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Tersusunnya Raperda dan Perda APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperda dan Perda APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen
9	Eselon 4 (Perbendaharaan)	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	45 SKPD	45 SKPD
		Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Triwulan	4 Triwulan
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Bank	12 Laporan	12 Laporan

		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan DAK dan DID	46 Dokumen	46 Dokumen
		Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	SK pengelolaan keuangan daerah	17 Dokumen	17 Dokumen
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100%	100%
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan dari DPMD yang di selesaikan	100%	100%
10	Eselon 4 (Akuntansi dan Pelaporan)	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Penyusunan Sistem	Jumlah Draft awal Penyusunan Sistem	1 Dokumen	0 Dokumen

		dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45 SKPD	45 SKPD
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 SKPD	45 SKPD
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen
11	Eselon 4 (Aset dan Investasi)	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	90 Laporan
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	24 Laporan
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terlaksananya	Persentase usulan	100%	100%

		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti		
		Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	0 Dokumen
		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	12 Bulan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 100% > : Baik Sekali,
- b. 75% - < 100% : Baik,
- c. 55% - < 75% : Cukup,
- d. < 55% : Kurang.

Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Pencapaian Kinerja sebagai Evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapin dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pada Laporan ini dapat dilihat capaian kinerja BKAD Kabupaten Tapin beserta realisasinya. Adapun target beserta sasaran dan pencapaian BKAD Kabupaten Tapin dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama BKAD Kab. Tapin Tahun 2022

**CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKAD KAB. TAPIN
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%	272,42%
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	97%	83,51%	86,09%
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	98,08%	98,08%

**SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%	272,42%

Pada IKU ini maksudkan untuk mengukur substansi, relevansi, dan konsistensi anggaran belanja sesuai kinerja yang ingin dicapai OPD. Penelaahan dilakukan oleh Tim Anggaran terhadap seluruh dokumen RKA OPD melalui arangkaian acara desk.

Perhitungannya bersumber dari usulan anggaran OPD (RKPD) dengan hasil KUAPPAS. Perhitungannya didapat dari rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Usulan Anggaran SKPD} - \text{Jumlah Anggaran Berdasarkan indikator kinerja SKPD}}{\text{Jumlah Usulan Anggaran SKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{1.873.836.571.952 - 1.261.296.115.362}{1.873.836.571.952} \times 100\% = 32,69\%$$

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 32,69%. Apabila dibandingkan dengan target yang diinginkan yaitu sebesar 12% maka capaian dari IKU ini adalah sebesar 272,42%.

Dari capaian tersebut diatas jelas menggambarkan adanya efisiensi anggaran terhadap usulan anggaran yang disampaikan oleh OPD yang sering disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Efisiensi yang dimaksud adalah terhindarnya anggaran yang dialokasikan dalam suatu kegiatan/subkegiatan dari pemborosan yang dikategorikan sebagai belanja yang tidak substansi, tidak relevan bahkan tidak ada konsistensinya berdasarkan instrumen belanja yang kita terapkan.

Instrumen belanja yang digunakan adalah sebuah tools/alat bantu yang dapat digunakan dalam mengukur kewajaran belanja dalam pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang berfokus pada efisiensi. Namun tidak mengabaikan pengaruh terhadap efektifitas dari terlaksananya kegiatan/subkegiatan dimaksud. Tools/alat yang digunakan untuk mengukur kewajaran belanja suatu kegiatan/subkegiatan itu adalah Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah diformulasikan sedemikian rupa dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah guna menjamin tersedianya anggaran belanja yang efisien dan efektif.

Penerapan ASB dan SSH secara berkesinambungan dan mendorong TAPD untuk semaksimal mungkin menggunakan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari tahapan perencanaan dan penganggaran akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan tata kelola keuangan. Pada tahapan penatausahaan dan pelaporan dituntut untuk selalu menganut asas kewajaran, transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

Kegiatan Verifikasi RKA Oleh Tim TAPD



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Akibat keterlambatan penetapan APBD tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan. Disamping itu komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dalam mentaati jadwal penyusunan APBD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Hasil dari IKU ini didapatkan berdasarkan ketentuan dari Permendagri No.77 Tahun 2020 Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD pada IKU ini merupakan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang harus di tetapkan pada tahun 2022 ini.

Perda	Perbup
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022	Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022

Dari data di atas didapatkan hasil Pengukuran IKU ini yaitu Penetapan APBD TA 2023 di tetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 sehingga realisasi nya 100% maka capaian IKU ini juga sebesar 100%.

Rapat Tim TAPD mengenai tindaklanjut hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD tentang APBD 2023



Rapat Paripurna APBD Tahun 2023



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97%	83,51%	86,09%

Dalam Proses Penatausahaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

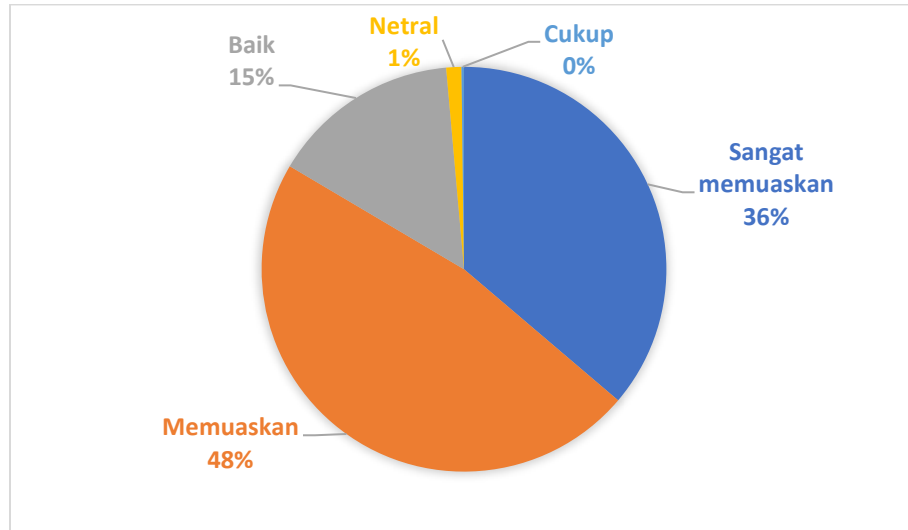
SP2D merupakan dokumen yang di terbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang di ajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SP2D adalah surat yang di pergunakan untuk mencairkan dana lewat Bank yang di tunjuk setelah SPM di terima oleh BUD.

Dalam pengurusan SP2D dibidang perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah di harapkan dapat memberikan pelayanan dapat mencapai indikator pelayanan yang berkualitas.

Dalam pengurusan Surat perintah pencairan dana bidang perbendaharaan akan diproses apabila persyaratan dalam pengurusan surat perintah pencairan dana sudah lengkap sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur yang ada, oleh karenanya berkas yang masuk untuk di proses pada loket bidang perbendaharaan adalah berkas yang sudah memenuhi persyaratan, berkas tersebutlah yang kemudian akan di layani dalam pengurusan surat perintah pencairan dana. Oleh karena itu setiap orang yang akan mengurus surat perintah pencairan dana diharapkan untuk dapat memenuhi semua ketentuan administrasi yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur. Berkas yang tidak memenuhi syarat dalam pengurusan surat perintah pencairan dana akan dikembalikan setelah melalui proses verifikasi oleh petugas yang berwenang.

Hasil dari IKU ini didapatkan melalui survey kepuasan dengan jumlah responden sebanyak 71 orang yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada lingkup Pemkab Tapin. Dari hasil pengukuran survey di dapatkan hasil sebesar 83,51%. Apabila di dibandingkan dengan target yang di tetapkan sebesar 97 maka diperoleh capaian sebesar 86,09%. Merujuk dari kriteria capaian kinerja hasil dari capaian IKU ini termasuk dalam rentang Sangat berhasil (85%-100%)

Hasil Survey



Loket Pelayanan SP2D



Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan dalam upaya Peningkatan Pelayanan SP2D Sosialisasi Perpajakan



Sosialisasi Pengelolaan DAK



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.77 tahun 2020 Laporan keuangan daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BKAD Kabupaten Tapin menginginkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Peningkatan tersebut baik dalam penyajian laporan yang sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual maupun dalam ketepatan waktu penyampaian. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini juga akan menunjang Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Daerah (LKD) pada IKU ini adalah LKD tahun 2021 yang di kerjakan atau disusun pada tahun 2022 ini.

Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD



Serah Terima Laporan Keuangan Daerah (LKD) dengan BPK-RI



Dari data di atas didapatkan hasil Pengukuran IKU ini yaitu Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat diselesaikan pada tanggal 22 Maret 2022 untuk diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana sesuai peraturan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret sehingga realisasinya 100% maka capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan target juga sebesar 100%.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100%	98,08%	98,08%

Sebagai SKPD pengelola aset daerah Kabupaten Tapin, BKAD Kabupaten Tapin sesuai tupoksinya yaitu pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset dan investasi daerah maka penatausahaan barang milik daerah harus dilakukan secara optimal hal ini untuk mencapai sasaran strategis yaitu tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Berikut capaian kinerja dengan indikator kinerja utama Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengukuran kinerja pada indikator ini merupakan gabungan beberapa variabel yaitu :

1. Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai BMD yang tercatat}}{\text{Nilai BMD yang dimiliki}} \times 100 \%$$

2. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai BMD yang digunakan}}{\text{Nilai BMD yang dimiliki}} \times 100 \%$$

3. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Usulan BMD yang dihapus}}{\text{Nilai BMD yang dihapus}} \times 100 \%$$

4. Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan RKBU yang terverifikasi}}{\text{Jumlah RKBU yang di usulkan}} \times 100 \%$$

Untuk menghitung IKU “ Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan” yaitu dengan menjumlahkan hasil dari ke empat indikator tersebut di atas kemudian dibagi dengan 4 (empat) setelah itu dikalikan dengan 100 (seratus) persen, itulah hasil yang di dapat untuk memperoleh persentase IKU tersebut.

Berikut ini perhitungan indikator dengan menggunakan data dari bidang aset dan investasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai / Jumlah
1	Aset Tetap	3.965.263.142.111,32
a	Tanah	463.863.326.049,68
b	Peralatan dan Mesin	303.619.831.962,08
c	Gedung dan Bangunan	1.112.566.709.811,58
d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.806.439.104.794,51
e	Aset Tetap Lainnya	23.978.467.859,00
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	254.795.701.634,47
2	Aset Lainnya	463.863.326.049,68
a	Kemitraan dengan pihak ketiga	0
b	Aset Tidak Berwujud	8.567.699.977,40
c	Aset Rusak Berat	26.602.544.125,67
3	Ekstrakom	14.059.670.729,00
4	Dokumen RKBU BMD	45 dokumen
5	Dokumen RKBU BMD yang diverifikasi	45 dokumen

Dari data yang ada pada tabel tersebut maka akan didapatkan data-data untuk menghitung variable - variable sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Ket
1	Jumlah BMD Yang Tercatat	4.000.433.386.214,39	Aset tetap + Aset Lainnya
2	Jumlah BMD Yang Dimiliki	4.000.433.386.214,39	Aset tetap + Aset Lainnya
3	Jumlah BMD Yang Digunakan	3.692.432.596.328,58	Aset tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Rusak Berat + Aset Tak Berwujud
4	Jumlah BMD Yang Dimanfaatkan	9.215.156.721	
5	Jumlah BMD Yang Tidak Digunakan	26.602.544.125,67	aset rusak berat
6	Usulan BMD yang dihapus	18.579.377.305,40	
7	Jumlah BMD yang Dihapus	18.579.377.305,40	
8	Jumlah Dokumen RKBU SKPD Yang terverifikasi	45 dokumen	
9	Jumlah Dokumen RKBU SKPD yang di usulkan	45 dokumen	

1. Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{4.000.433.386.214,39}{4.000.433.386.214,39} \times 100 \% \\ = 100\%$$

2. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{3.692.432.596.328,58}{4.000.433.386.214,39} \times 100 \% \\ = 92,30\%$$

3. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{18.579.377.305,40}{18.579.377.305,40} \times 100 \% \\ = 100\%$$

4. Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{45 \text{ dokumen}}{45 \text{ dokumen}} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

Jadi dari hasil perhitungan di atas maka jumlah persentase keseluruhannya adalah $100+92,30+100+100 = 392,3$ dari hasil tersebut di bagi 4 (empat) $= 392,3/4 = 98,08$

Jadi rata-rata persentase yang didapatkan adalah 98,08%. Maka persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan yang didapat adalah 98,08%. Maka capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan target adalah 98,08%.

Kegiatan Konsolidasi Laporan BMD dengan SKPD



Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan BMD



Berdasarkan uraian hasil IKU diatas dapat disimpulkan dari lima indikator yang ditetapkan oleh BKAD Kab.Tapin tahun 2022, kelima indikator memperoleh capaian diatas 80%.

Berikut dapat diinformasikan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja BKAD Kab.Tapin Tahun 2022 yang memuat Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaiannya.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Utama dan Realisasi IKU BKAD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
				Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%	272,42%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	963.508.600	896.254.300
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	97%	83,51%	86,09%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	342.944.200	262.138.500
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	98,08%	98,08%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.769.500	893.240.121
Rata-rata realisasi dari sasaran strategis 82,86%									

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Pada laporan ini juga di informasikan hasil realisasi dari pencapaian kinerja atas indikator kinerja pada tahun yang telah lalu, yaitu dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
dan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Renstra Tahun 2018-2023							
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	-	12%	5,68%	12%	32,69%
	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	92%	81,90%	95%	82,10%	97%	83,51%
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	99%	98,73%	99,50%	97,42%	100%	98,08%

Dari tabel diatas dapat diinformasikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sasaran strategis BKAD tidak mengalami perubahan hal ini karena sesuai dengan tugas utama adanya kantor BKAD adalah untuk membantu Kepala daerah dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah. Sedangkan yang mengalami perubahan adalah dari segi indikator kinerjanya. Perubahan indikator kinerja tersebut dilakukan untuk dari hasil review dengan tujuan perbaikan ke yang lebih baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada laporan ini juga di informasikan perbandingan hasil realisasi dari pencapaian kinerja atas indikator kinerja pada Sasaran Strategis Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah (Renstra), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Jangka Menengah	2022	
			Target	Realisasi
1	2	3	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	12%	32,69%
	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%
	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	97%	97%	83,51%
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	98,08%

Dari tabel diatas dapat diinformasikan untuk target jangka menengah dan target tahun berjalan pada BKAD adalah sama atau tidak mengalami perubahan, yang artinya dokumen perencanaan tahunan pada BKAD masih selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengahnya. Yang mana juga untuk hasil realisasinya sebagian besar diatas 80%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan keuangan daerah tentunya BKAD ada mengalami hal-hal penghambat dan juga menunjang dalam upaya mencapai keberhasilan target kinerja. Berikut beberapa uraiannya berdasarkan indikator kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan keuangan daerah tentunya BKAD ada mengalami hal-hal penghambat dan juga menunjang dalam upaya mencapai keberhasilan target kinerja. Berikut beberapa uraiannya berdasarkan indikator kinerja.

- a. Indikator Kinerja Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja :

Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang mengkaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Pada anggaran 2022 indikator ini target yang di tetapkan sebesar 12%, dari hasil perhitungan efisiensi anggaran bisa didapatkan yaitu 32,69%. Upaya yang dilakukan BKAD untuk mewujudkan tercapainya indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun dengan pihak DPR mulai dari tahap RKPD sampai KUA dan PPAS agar selalu mengawal SKPD dalam menyusun anggaran agar tidak hanya memperhatikan besaran nilai rupiah nya saja tetapi juga memperhatikan kinerja yang ingin dicapai.

- b. Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu :

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Akibat keterlambatan penetapan APBD tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan. BKAD Kabupaten Tapin secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran untuk berkomitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu. Upaya lain nya dilakukan BKAD adalah membuat jadwal pengimputan RKA dan DPA oleh seluruh SKPD ke dalam sistem aplikasi anggaran.

- c. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D :

Pada pelayanan SP2D ini terdapat kendala yaitu adanya pergantian bendahara dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk kelurahan, walau

adanya pergantian bendahara dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk kelurahan masih dapat mengerti tentang tata laksana perbendaharaan. Upaya yang dilakukan akibat adanya pergantian bendahara dan KPA tersebut adalah dengan diadakanya Bimtek Penatausahaan Keuangan maka pengetahuan bendahara yang sering berhubungan dengan pelayanan SP2D meningkat, sehingga meminimalisir kesalahan. Pelaksanaan Bimtek tersebut diharapkan minimal tiga kali dalam setahun, karena sering adanya perubahan kebijakan.

- d. Indikator Kinerja Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu :

Kabupaten Tapin telah mendapatkan penghargaan dari BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut, yaitu tahun dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendukung laporan keuangan yang berkualitas. Berkualitas dalam penyajian yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual serta berkualitas dalam penyampaian laporan keuangan selalu tepat waktu. Faktor yang mendukung atas keberhasilan tersebut karena ada kemauan dan komitmen pemerintah daerah dengan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. BKAD Kabupaten Tapin secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD, meningkatkan kualitas SDM terutama pejabat yang terlibat menangani pembuatan laporan keuangan SKPD dengan meniadakan bimtek penyusunan laporan keuangan satu tahun sekali dalam rangka penyelesaian laporan keuangan SKPD yang akhirnya menunjang kelancaran dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

- e. Indikator Kinerja penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan :

Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah juga perlu mendapat perhatian khusus karena dengan pengelolaan yang tertib dan sesuai ketentuan akan memberikan hasil yang baik terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan laporan keuangan daerah, penatausahaan barang milik daerah pun BKAD Kabupaten Tapin secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD, meniadakan bimtek penyusunan laporan BMD satu tahun sekali dalam rangka penyelesaian penatausahaan barang untuk penyelesaian laporan barang milik daerah yang dimulai dari level SKPD sehingga ketertiban dan kesesuaian

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada seluruh bidang di BKAD guna menunjang peningkatan kinerja.

Dari segi sumber daya manusia BKAD memiliki 61 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang ASN dan 29 orang pegawai tidak tetap. Dalam melaksanakan upaya pencapaian IKU yang ditetapkan SDM di BKAD agar bekerja lebih efektif dan efisien terutama dalam penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang, BKAD menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD seperti aplikasi Simda, FMIS dan SIPD.

Dari sumber daya anggaran BKAD pada tahun 2022 ini sampai dengan anggaran perubahan memiliki anggaran sebesar Rp.14.994.753.143,- dan memiliki realisasi anggarannya sebesar Rp.13.746.725.837,- sehingga dengan capaian realisasi yaitu 91,68% memiliki efisiensi sebesar Rp.1.248.027.306,- atau 8,32%.

Tabel 3.4
Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

Kepala Badan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	32,69%	272,42%
		Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97%	83,51%	86,09%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100%	98,08%	98,08%

Sekretaris

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%

Bidang Anggaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Bidang Perbendaharaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pencairan dana SKPD lingkup Pemkab Tapin	Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD (sesuai SAP dan berbasis akrual)	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengelolaan barang milik daerah Pemkab Tapin yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100%	100%	100%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%	92,30%	92,30%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%	100%	100%
		Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100%	100%	100%

Sub Bagian Keuangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
2	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100%

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%

Sub Bidang Anggaran I

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya penyusunan regulasi tentang penganggaran.	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD.	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%
5	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD.	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%

Sub Bidang Anggaran II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%

JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Anggaran III)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sub Bidang Perbendaharaan I

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	45 SKPD	45 SKPD	100%
2	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Triwulan	4 Triwulan	100%
3	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sub Bidang Perbendaharaan II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Persentase Laporan DAK dan DID yang dilaporkan	100%	100%	100%
4	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah sisdur Pengelolaan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Perbub Pengelolaan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Perbub Pembayaran Gaji 13 & THR	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah SOP Perpajakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		SK pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%

JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Perbendaharaan III)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Keuangan Tahunan PDAM, BPR, Bank Kelsel	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan dari DPMD yang di selesaikan	100%	100%	100%

Sub Bidang Pembukuan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pencatatan / Pembukuan Transaksi Keuangan	Waktu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Waktu Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sub Bidang Pelaporan Keuangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Kompilasi Informasi Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Waktu Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Waktu Kompilasi Laporan Keuangan BLUD, JKN, dan BOS	12 Bulan	12 Bulan	100%

JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Waktu Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi keuangan SKPD	90 Laporan	90 Laporan	100%

		Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	24 Laporan	24 Laporan	100%
--	--	---	------------	------------	------

Sub Bidang Penatausahaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	90 Laporan	100%
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	24 Laporan	100%
5	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100%	100%	100%

Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	0	0%
3	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya BKAD untuk mewujudkan pencapaian kinerja maka di rancanglah program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dirancang oleh BKAD berfokus pada pencapaian untuk meningkatkan pengelolaan keuangan keuangan daerah dan meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.

Sasaran startegis ke satu yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah program kegiatannya adalah :

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja dan Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu. Pada kegiatan ini BKAD melakukan kegiatan pengelolaan anggaran baik anggaran murni dan anggaran perubahan mulai dari KUA dan PPAS, koordinasi pembuatan dokumen RKA dan DPA, serta koordinasi pembuatan produk hukum yaitu Perda dan Perbub pelaksanaan APBD.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pencapaian indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D. Pada kegiatan ini BKAD melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dan pihak-pihak terkait untuk ketertiban pengelolaan keuangan pencairan dana baik dana yang bersumber dari APBD maupun bersumber APBN. Melaksanakan bimtek untuk pejabat pengelola keuangan SKPD seperti bendahara dan bendahara pembantu, dan juga pejabat pengelola kepegawiaan seperti kasubag umum dan kepegawain.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pencapaian indikator Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu. Pada kegiatan ini BKAD melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi standar yang di tetapkan oleh pemerintah, yaitu SAP dan berbasis Akrual. Melakukan koordinasi pembuatan produk hukum yaitu Perda dan Perbub pertanggungjawaban APBD. Pada kegiatan ini BKAD juga melakukan bimtek penyusunan laporan keuangan

untuk seluruh SKPD untuk peningkatan kualitas SDM yang menangani laporan keuangan.

Sasaran startegis ke dua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah program kegiatannya adalah :

Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pencapaian indiaktor Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan. Pada kegiatan ini BKAD melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD agar tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Melaksanakan penyusunan standar satuan harga, melakukan administrasi penghapusan, pemindahtanganan, serta lelang BMD. Pada kegiatan ini BKAD juga melakukan bimtek penatausahaan BMD bagi pejabat penatausahaan barang SKPD untuk peningkatan kualitas SDM nya.

7. Analisis Perbandingan IKU dengan daerah lainnya (SKPD yang indikatornya sama dengan daerah lain)

Dalam melaksanakan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BKAD, selain mengukur realisasi terhadap IKU tersebut juga diperlukan melihat hasil yang dicapai oleh BKAD Kabupaten Tapin dengan BKAD dari daerah lain dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kekuarangan serta kelemahan atas pencapain IKU tersebut.

Pada kesempatan ini dari hasil penelusuran indikator yang memiliki kemiripan dengan indikator BKAD Kabupaten Tapin yaitu dari BPKAD Kota Banjarbaru. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja dan target nya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kualitas penganggaran APBD	Persentase rancangan perda APBD dan rancangan perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100
2	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100
3	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100

4	Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik daerah (BMD)	Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam neraca keuangan	100
---	--	--	-----

Dari data diatas dapat di informasikan untuk IKU yang memiliki kemiripan dengan IKU BKAD Kab.Tapin yaitu pada IKU nomor 1 dan 2. Dimana untuk IKU tersebut yang menjadi pembahasan adalah Penetapan APBD yang di lakukan tepat waktu dan Laporan Keuangan Daerah yang diselesaikan tepat waktu.

Untuk target yang di tetapkan sama-sama memakai persentase dengan hasil yang diinginkan yaitu 100%. Kesamaan indikator ini dikarenakan penetapan APBD dan Laporan keuangan daerah merupakan urusan yang menjadi tupoksi dari badan keuangan. Penetapan APBD yang tepat waktu dan Laporan Keuangan daerah yang tepat waktu berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020. Dari hasil yang didapatkan oleh BKAD Kab.Tapin untuk ke dua IKU tersebut yaitu 100%. Yang artinya kinerja yang diharapkan dalam pengelolaan APBD dan pelaporan keuangan daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Tahun anggaran 2022 ini BKAD Kab.Tapin melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sampai dengan setelah perubahan Rp.14.994.753.143,00,-.

Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp.13.746.725.837,00,- dengan capaian 91,68% dengan capaian tersebut dapat dikategorikan Sangat baik. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang terlaksana karena terkendala waktu, atau peraturan dan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran namun semua kendala tersebut tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
A	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupate/Kota	12.046.066.843	11.229.457.016	816.609.827	93,22
I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30.345.000	29.976.900	368.100	98,79
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.800.000	1.796.400	3.600	99,80
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.545.000	28.180.500	364.500	98,72
II	Adminitrasi keuangan perangkat daerah	6.477.847.963	6.095.885.845	381.962.118	94,10
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.440.993.963	6.060.617.745	380.376.218	94,09

4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.809.000	2.704.500	1.104.500	71,00
5	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	33.045.000	32.563.600	481.400	98,54
III	Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	54.094.450	49.400.900	4.693.550	91,32
6	Bimbingan teknis emplantasi peraturan perundang - undangan	54.094.450	49.400.900	4.693.550	91,32
IV	Administrasi umum perangkat daerah	3.050.573.540	2.891.294.430	159.279.110	94,78
7	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	124.993.340	124.916.600	76.740	99,94
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	902.231.800	888.007.905	14.223.895	98,42
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.028.600	10.028.600	-	100,00
10	Penyediaan barang logistik kantor	235.757.200	215.510.625	20.246.575	91,41
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	101.248.600	101.121.000	127.600	99,87
12	Penyediaan bahan/material	6.191.000	4.102.500	2.088.500	66,27
13	Fasilitas kunjungan tamu	58.853.000	53.130.000	5.723.000	90,28
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.611.270.000	1.494.477.200	116.792.800	92,75
V	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	937.416.200	924.378.800	13.037.400	98,61
15	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	937.416.200	924.378.800	13.037.400	98,61
VI	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	836.823.040	648.971.341	187.851.699	77,55
16	Penyediaan jasa surat menyurat	8.120.000	8.100.000	20.000	99,75
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	365.080.000	337.061.593	28.018.407	92,33
18	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	463.623.040	303.809.748	159.813.292	65,53
VII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	658.966.650	589.548.800	69.417.850	89,47
19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	84.209.150	78.037.900	6.171.250	92,67
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60.620.000	47.310.000	13.310.000	78,04
21	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	514.137.500	464.200.900	49.936.600	90,29
B	Program pengelolaan keuangan daerah	2.005.916.800	1.624.028.700	381.888.100	80,96
VIII	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	963.508.600	896.254.300	67.254.300	93,02
22	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	66.660.000	63.355.000	3.305.000	95,04
23	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	58.500.000	57.390.000	1.110.000	98,10
24	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	9.020.000	9.005.000	15.000	99,83
25	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	7.740.000	7.440.000	300.000	96,12
26	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	36.230.000	36.195.000	35.000	99,90
27	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	34.990.000	34.184.000	806.000	97,70
28	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	253.602.600	199.492.000	54.110.600	78,66
29	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	137.830.100	130.969.500	6.860.600	95,02
30	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	358.935.900	358.223.800	712.100	99,80
IX	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	699.464.000	465.635.900	233.828.100	66,57
31	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	78.020.000	69.125.000	8.895.000	88,60
32	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	43.212.000	33.418.500	9.793.500	77,34
33	Penatausahaan pembiayaan daerah	15.100.000	13.242.400	1.857.600	87,70
34	koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	43.440.000	33.830.000	9.610.000	77,88

35	koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penepatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	35.100.000	27.100.000	8.000.000	77,21
36	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pengumutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	81.152.000	533.100	80.618.900	0,66
37	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penata usahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	156.560.000	139.686.000	16.874.000	89,22
38	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	246.880.000	148.700.900	98.179.100	60,23
X	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	342.944.200	262.138.500	80.805.700	76,44
39	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	52.250.000	51.730.700	519.300	99,01
40	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO dan beban	14.000.000	11.544.000	2.456.000	82,46
41	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	22.823.600	19.662.600	3.161.000	86,15
42	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	37.050.000	35.017.200	2.032.800	94,51
43	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	60.345.600	59.825.000	520.600	99,14
44	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	61.050.000	53.244.000	7.806.000	87,21
45	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	62.300.000	-	62.300.000	-
46	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	33.125.000	31.115.000	2.010.000	93,93
C	Program pengelolaan barang milik daerah	942.769.500	893.240.121	49.529.379	94,75
XII	Pengelolaan barang milik daerah	942.769.500	893.240.121	49.529.379	94,75
47	Penyusunan standar harga	241.375.000	238.085.200	3.289.800	98,64
48	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	-	-	-	-
49	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	42.393.900	38.238.900	4.155.000	90,20
50	Penatausahaan barang milik daerah	75.880.000	63.442.000	12.438.000	83,61
51	Inventarisasi barang milik daerah	1.722.900	1.714.800	8.100	99,53
52	Pengamanan barang milik daerah	49.907.000	40.005.000	9.902.000	80,16
53	Penilaian barang milik daerah	-	-	-	-
54	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	314.967.300	301.631.000	13.336.300	95,77
55	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	45.681.400	43.679.200	2.002.200	95,62
56	Penyusunan laporan barang milik daerah	15.780.000	13.549.600	2.230.400	85,87
57	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/ kota	155.062.000	152.894.421	2.167.579	98,60
	Total	14.994.753.143	13.746.725.837	1.248.027.306	91,68

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja BKAD Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan

Pengukuran dan penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin ini menggambarkan kinerja yang diperoleh selama satu tahun, dimana dari laporan ini dapat kita peroleh beberapa kesimpulan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang. Kesimpulan dan saran tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Realisasi dengan sasaran / kinerja utama Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan dari indikator Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah 32,69% dari target 12% dengan capaian 272,42%, kategori capaian Baik Sekali.
2. Realisasi dengan sasaran / kinerja utama Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu berhasil dicapai dengan baik dengan capaian kinerja “tepat waktu” atau dengan persentase 100 persen. Capaian ini selalu dapat dipertahankan dari tahun ke tahun dalam rangka mendukung sasaran yang telah ditetapkan, kategori capaian Baik.
3. Realisasi dari kinerja utama meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu dengan capaian kinerja “tepat waktu” atau dengan persentase sebesar 100 persen, kategori capaian Baik. Capaian ini menunjukkan indikator baik selalu dipertahankan setiap tahun untuk mendukung salah satu unsur indikator Kabupaten Tapin dalam mencapai opini WTP dari BPK RI.
4. Realisasi dari kinerja utama meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D. Realisasi pada sasaran ini mencapai persentase skor 83,51 dari target skor 97% dengan capaian 86,09% dengan kategori capaian Baik. Walaupun tidak maksimal mencapai 100 persen capaian ini sudah baik gambaran pelayanan pada bidang perbendaharaan khususnya dalam pelayanan SP2D.

5. Realisasi dari kinerja utama Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan mencapai 98,08% dari target 100% dengan capaian 98,08%, kategori capaian Baik.

B. Saran - saran

Mempertahankan capaian kinerja dengan persentase 100 persen dan lebih meningkatkan kinerja yang pencapaiannya masih belum sesuai target yang diharapkan juga dengan selalu mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang lebih optimal.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Kabupaten Tapin ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur BKAD Kabupaten Tapin juga sebagai bahan masukan pimpinan untuk meningkatkan kinerja SKPD BKAD Kabupaten Tapin dan meningkatkan koordinasi baik secara internal ataupun secara eksternal dengan pihak yang terkait sehingga terjalin hubungan yang harmonis untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan.

Rantau, Februari 2023

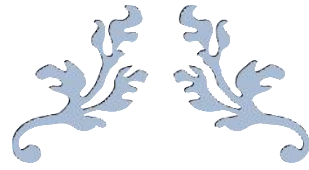
Pt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin



Haris Fannilah, SE, MM

Pembina

NIP. 19740626 200501 1 005



LAMPIRAN LKIP 2022



BKAD KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 900/21/BKAD/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021;
15. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/185/KUM/2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
 2. Memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :
1. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis OPD;
 2. Perencanaan Tahunan;
 3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 07 Desember 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Kabupaten Tapin,



DR. H. SUPANSYAH, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19700616 199003 1 002

Lampiran Keputusan Kepala BKAD
Kabupaten Tapin

Nomor : 900/21/BKAD/2021

Tanggal : 07 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	Jumlah Usulan Anggaran SKPD – Jumlah Anggaran <u>Berdasarkan indikator kinerja SKPD</u> x 100% Jumlah Usulan Anggaran SKPD 1. Melaksanakan Desk antara SKPD dengan Tim Anggaran pada Saat Penyusunan Rancangan KUA PPAS 2. Melakukan Penelaahan usulan anggaran terhadap tujuan kegiatan yang ingin dicapai SKPD 3. Verifikasi TAPD Kriteria Anggaran Berbasis Kinerja : substansi, relevansi, dan konsistensi anggaran belanja sesuai kinerja yang ingin dicapai SKPD	Usulan Belanja RKPD dan PRA RKA OPD
	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)	Mengacu Pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kriteria Tepat Waktu : Penetapan APBD paling lambat akhir desember	Bidang Anggaran
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan SP2D (Nilai IKM)	Hasil Kuisisioner dari SKPD dengan responden Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bidang Perbendaharaan
	Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	Mengacu Pada : - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kriteria Tepat Waktu : Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir	Bidang Akuntansi
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan rumus sebagai berikut : <u>Nilai BMD yang tercatat</u> x 100 % Nilai BMD yang dimiliki Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan dengan rumus sebagai berikut : <u>Nilai BMD yang digunakan</u> x 100 % Nilai BMD yang dimiliki Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan dengan rumus sebagai berikut : <u>Nilai Usulan BMD yang dihapus</u> x 100 % Nilai BMD yang yang dihapus Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi dengan rumus sebagai berikut : <u>Dokumen usulan RKB</u> yang terverifikasi x 100 % Dokumen RKB yang di usulkan Kriteria BMD yang tertib : - <i>TERCATAT</i> di aplikasi SIMDA BMD untuk aset tetap dan aset tetap lainnya - <i>DIGUNAKAN</i> untuk aset tetap yang dimiliki - <i>DIHAPUS</i> untuk aset-aset yang tidak bisa digunakan - <i>TERVERIFIKASI</i> untuk usulan RKB	Bidang Pengelolaan BMD

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin,

DR. H. SUFIANSYAH, M.AP

Pembina Tk.1

NIP. 19700616 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 900/007/BKAD/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
 3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
 4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
 5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
 6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
 7. Menyusun laporan kinerja;
 8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi;
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan BKAD Kabupaten Tapin;
 11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku,
 13. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 11 Oktober 2020

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Kabupaten Tapin,



Lampiran Keputusan Kepala BKAD
Kabupaten Tapin
Nomor : 900/007/BKAD/2020
Tanggal : 11 Oktober 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala BKAD
2	Ketua	Sekretaris BKAD
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5	Anggota	Kepala Bidang Anggaran
6	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan
7	Anggota	Kelapa Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
9	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Anggota	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
11	Anggota	Kepala Sub Bidang Pembukuan
12	Anggota	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD
13	Anggota	Kepala Sub Bidang Anggaran I
14	Anggota	Kepala Sub Bidang Anggaran II
15	Anggota	Kepala Sub Bidang Anggaran III
16	Anggota	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
17	Anggota	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
18	Anggota	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III
19	Anggota	Kepala Sub Bidang Penatausahaan
20	Anggota	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan
21	Anggota	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Kabupaten Tapin,


DR. H. SUBHANSYAH, M.AP
Pembina
NIP. 19700616 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN EVALUASI SAKIP

Nomor 700/015/LHE.EV.SAKIP/Wil.IV/INSP
Tanggal 26 Juli 2021

O B R I K :

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Rantau, 26 Juli 2021

Nomor : 700/015/LHE.EV.SAKIP/Wil.IV/INSP/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020

KEPADA

YTH. Kepala Badan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Tapin

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dan berbudaya kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin **Memuaskan** (predikat A) dengan nilai 82,53 Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin sudah Memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,31	27,31
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,81	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,15	12,04
d.	Evaluasi Internal	10	5,92	7,56
e.	Capaian Kinerja	20	17,00	16,56
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,19	82,53
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Rencana Kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi
3. Laporan Kinerja belum memberikan informasi tentang efisiensi yang dapat dikuantifikasikan
4. Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut :

1. Agar Rencana Kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Agar Mengembangkan dan menggunakan Teknologi informasi untuk mengukur kinerja
3. Laporan Kinerja agar memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasikan
4. Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

Inspektur Kabupaten,



r.

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I

NIP.19700722 200501 1 013

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	91,03%	27,31	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	84,58%	8,46	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	91,67%	1,83	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		B	0,75	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,75	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	94,25%	18,85	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	93,75%	3,75	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/luas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	85,00%	5,10	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK

18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Penjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	76,25%	19,06	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	75,00%	9,38	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	80,25%	12,04	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	75,00%	5,63	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK

15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	75,58%	7,56	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambalannya		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	73,67%	3,68	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah membenarkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	82,81%	16,56	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	92,50%	11,56	
4	Target dapat dicapai			0,81	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,25	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			3,50	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	82,53%	82,53	

MONEV RENCANA AKSI TA 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Eselon II

Kepala Badan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%				32,69%	32,69%
		Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100%			50%	50%	100%
		Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%				100%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97%				83,51%	83,51%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100%				98,08%	98,08%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,



Haris Feunilah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Eselon III

Unit Organisasi : Sekretariat

Tahun Anggaran : 2022

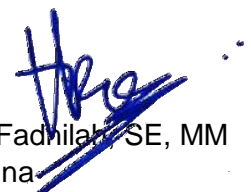
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	25%	25%	25%	25%	100%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	25%	25%	25%	25%	100%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	25%	25%	25%	25%	100%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,



Haris Fadhlilah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Sekretaris BKAD Kab.Tapin



Haris Fadhlilah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Unit Organisasi : Bidang Anggaran
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%			50%	50%	100%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,



Haris Fadhilah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Kabid. Anggaran BKAD Kab.Tapin



M. Ridhoriyadi Fakhrin, SE.Ak, MM
Penata Tk.I
NIP. 19850622 201001 1 017

Unit Organisasi :Bidang Perbendaharaan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pencairan dana SKPD lingkup Pemkab Tapin	Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti	100%				100%	100%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,



Haris Fadhlhan, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Kabid. Perbendaharaan BKAD Kab.Tapin




Muhammad Anshary, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19731020 200604 1 016


Unit Organisasi : Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD (sesuai SAP dan berbasis akrual)	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%				100%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,


Haris Fachrudin, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab.Tapin


Misry Khaulany, SE
Penata Tk.I
NIP. 19730623 200501 1 011

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Pengelolaan barang milik daerah Pemkab Tapin yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100%				100%	100%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%				92,30%	92,30%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%				100%	100%
		Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100%				100%	100%

Plt.Kepala BKAD Kab.Tapin,



Haris Fadhillah, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19740626 200501 1 005

Kabid. Pengelolaan BMD BKAD Kab.Tapin




H. Supian Noor, S.IP
 Pembina
 NIP. 19741110 199403 1 012

Eselon IV dan Jf Penyetaraan


Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD	19 Dokumen	6	5	4	4	19
2	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3	4	4	3	14

Sekretaris BKAD Kab.Tapin


Haris Fadhillan, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Plt. Kasubag. Keuangan BKAD Kab.Tapin


Netty Herawati, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19820918 200701 2 006

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	10 Dokumen	4	1	2	3	10

Sekretaris BKAD Kab.Tapin



Haris Fadluwah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan BKAD



Daniel Rahmatullah, SKM
Penata
NIP. 19860809 201001 1 011

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	100%	25%	25%	25%	25%	100%
2	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	25%	25%	25%	25%	100%

Sekretaris BKAD Kab.Tapin



Haris Fadhillah, SE, MM
Pembina
NIP. 19740626 200501 1 005

Kasubag. Umum dan Kepegawaian BKAD

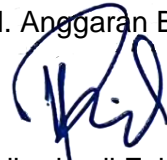


Abdul Razak, S.Kom
Penata
NIP. 19740604 200904 1 003

Unit Organisasi : Sub Bidang Anggaran I
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	2	2
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	2	2
3	Terlaksananya penyusunan regulasi tentang penganggaran.	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	0	0	4	0	4
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD.	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	0	58	58
5	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD.	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	0	58	58

Kabid. Anggaran BKAD Kab.Tapin



M. Ridhoriyadi Fakhri, SE.Ak, MM
Penata Tk.I
NIP. 19850622 201001 1 017

Kasubid. Anggaran I BKAD Kab.Tapin



Joni Ansyari, S. Kom, MM
Penata
NIP. 19740616 200501 1 011

Unit Organisasi : Sub Bidang Anggaran II

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	0	0	2	0	2
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	2	2
3	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	58	0	58
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	0	58	58

Kabid. Anggaran BKAD Kab.Tapin

M. Ridhoriyadi Fakhri, SE.Ak, MM
Penata Tk.I
NIP. 19850622 201001 1 017

Kasubid. Anggaran II BKAD Kab.Tapin

Zainal Abidin, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19760903 200012 1 006

Unit Organisasi : Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Anggaran III)
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	0	0	2	0	2
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahn PPAS	2 Dokumen	0	0	2	0	2

Kabid. Anggaran BKAD Kab.Tapin



M. Ridhoriyadi Fakhrin, SE.Ak, MM
Penata Tk.I
NIP. 19850622 201001 1 017

Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

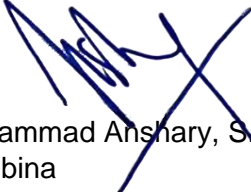


Suriansyah, SE
Penata Tk.I
NIP. 19760123 201001 1 014


Unit Organisasi : Sub Bidang Perbendaharaan I
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	45 SKPD	0	0	45	0	45
2	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Triwulan	1	1	1	1	4
3	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	3	3	3	3	12
4	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	3	3	3	3	12

Kabid. Perbendaharaan BKAD Kab.Tapin


Muhammad Anshary, S.Sos
Pembina
NIP. 19731020 200604 1 016

Kasubid. Perbendaharaan I BKAD Kab.Tapin

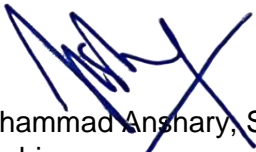

Hendra Yatmika, S.Kom
Penata
NIP. 19750606 200501 1 015

Unit Organisasi : Sub Bidang Perbendaharaan II


Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Anggaran	12 Laporan	3	3	3	3	12
2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Laporan DAK dan DID	40-50 Dokumen	30	32	25	26	113
3	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan	1 Dokumen	0	0	0	1	1
		Jumlah Perbub Pengelolaan Keuangan	1 Dokumen	0	0	0	1	1
		Jumlah Perbub Pembayaran Gaji 13 & THR	1 Dokumen	0	1	0	0	1
		Jumlah SOP Perpajakan	1 Dokumen	0	0	0	1	1
		Jumlah SK pengelolaan keuangan daerah	15-40 Dokumen	17	10	11	6	44

Kabid. Perbendaharaan BKAD Kab.Tapin


 Muhammad Anshary, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19731020 200604 1 016

Kasubid. Perbendaharaan II BKAD Kab.Tapin

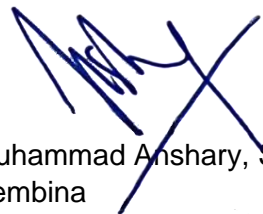

 M. Rizqi Maulana, SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19870114 201001 1 007

Unit Organisasi : Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Perbendaharaan III)

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Koordinasi Pembiayaan Daerah	1 Kegiatan	0	0	0	1	1
2	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Keuangan Tahunan PDAM, BPR, Bank Kelsel	3 Dokumen	0	0	0	3	3
3	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100%	25%	25%	25%	25%	100%
4	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan dari DPMD yang di selesaikan	100%	25%	25%	25%	25%	100%

Kabid. Perbendaharaan BKAD Kab.Tapin



Muhammad Anshary, S.Sos
Pembina
NIP. 19731020 200604 1 016

Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah



Emerzi Habiba, SE, MM
Penata
NIP. 19821116 201503 2 001

Unit Organisasi : Sub Bidang Pembukuan

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Meningkatnya Kualitas Pencatatan / Pembukuan Transaksi Keuangan	Waktu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	12
		Waktu Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	3	3	3	3	12

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab.Tapin



Misry Khaulany, SE
Penata Tk.I
NIP. 19730623 200501 1 011

Kasubid. Pembukuan BKAD Kab.Tapin



Agus Romnyadi, S. Kom
Penata
NIP. 19760828 200501 1 012

Unit Organisasi : Sub Bidang Pelaporan Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Kompilasi Informasi Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Waktu Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	3	3	3	3	12
		Waktu Kompilasi Laporan Keuangan BLUD, JKN, dan BOS	12 Bulan	3	3	3	3	12

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab.Tapin



Misry Khaulany, SE
Penata Tk.I
NIP. 19730623 200501 1 011

Plt.Kasubid. Pelaporan Keuangan BKAD Kab.Tapin



Agus Ronnyadi, S. Kom
Penata
NIP. 19760828 200501 1 012

Unit Organisasi : Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban)
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	1	1	1	0	3
		Waktu Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Bulan	0	3	0	0	3
		Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi keuangan SKPD	9 Laporan	9	0	0	0	9
		Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	3 Berkas	0	3	0	0	3

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab.Tapin



Misry Khaulany, SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19730623 200501 1 011

Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah



Rahmalinda, SE, MM
 Penata
 NIP. 19861204 201503 2 001

Unit Organisasi : Sub Bidang Penatausahaan
Tahun Anggaran : 2022

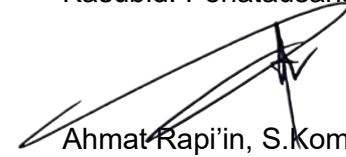
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	3	3	3	3	12
2	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	3	3	3	3	12
3	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	45	0	45	0	90
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	0	12	0	12	24
5	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	0	0	1	0	1

Kabid. Pengelolaan BMD BKAD Kab.Tapin



H. Supian Noor, S.IP
Pembina
NIP. 19741110 199403 1 012

Kasubid. Penatausahaan BKAD Kab.Tapin



Ahmat Rapi'in, S.Kom, MM
Penata Tk.I
NIP. 19790906 200904 1 003

Unit Organisasi : Jf. Analis Kebijakan (Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan)

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	0	0	0		0
2	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100%	9	11	21		100%

Kabid. Pengelolaan BMD BKAD Kab.Tapin



H. Supian Noor, S.IP
Pembina
NIP. 19741110 199403 1 012

Jf. Analis Kebijakan



Ika Mayasari, ST, MM
Penata
NIP. 19860226 201503 2 002

Unit Organisasi : Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	0	1	0	0	1
2	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	0	0	0	0	0
3	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	0	0	0	2	2
4	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	3	3	3	3	12

Kabid. Pengelolaan BMD BKAD Kab.Tapin



H. Supian Noor, S.IP
Pembina
NIP. 19741110 199403 1 012

Kasubid. Kasubid. Pemeliharaan dan Pengamanan
BKAD Kab.Tapin



Fitri Rolyani, S.AP.,MM
Penata Tk.
NIP. 19820723 200701 2 005

MONEV IKI TA 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pelaksana / Staf

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai rencana penggunaan biaya yang tercantum dalam DPA dan SPD untuk kelancaran penerbitan SPM	Jumlah SPP yang dicetak	55 SPP	12	32	24	38	106
2	Mengambil Surat Perintah Membayar (SPM) pada PPK-SKPD untuk disampaikan kepada BUD sebagai pemegang kas daerah	Jumlah SPM yang diambil dari PPK-SKPD	55 SPM	12	32	24	38	106

3	Menyampaikan SP2D dari BUD ke Bank yang ditunjuk untuk tertib penyimpanan keuangan SKPD	Jumlah SP2D yang diantar ke Bank	55 SP2D	12	32	24	38	106
4	Membuat surat pemindahbukuan untuk pembayaran transaksi non tunai sesuai dengan kuitansi dan bukti dukung lainnya yang telah disetujui oleh pengguna anggaran	Persentase Pinbuk yang diselesaikan	100%	25	25	25	25	100

Plt. Kasubag. Keuangan BKAD Kab.Tapin



Netty Herawati, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19820918 200701 2 006

Bendahara Pengeluaran




Adriansyah, A.Md
Pengatur Tk.I
NIP. 19780921 200904 1 001

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Menerima, memeriksa, dan membuat catatan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapan bukti pendukung SPJ Belanja	Jumlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Belanja yang akan dilakukan proses verifikasi	1200 Berkas	194	364	418		976
2	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pengeluaran Belanja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai petunjuk teknis verifikasi.	Jumlah kesamaan nilai dari Rekonsiliasi Data Realisasi Pengeluaran Belanja dengan Dokumen DPA, SPD, dan SPM	1200 Berkas	194	364	418		976
3	Melaksanakan Penatausahaan, Inventarisasi, dan membuat laporan BMD BKAD dengan tertib sesuai aturan yang berlaku	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan, Inventarisasi, dan Laporan BMD	12 Bulan	3	3	3	3	12

Plt. Kasubag. Keuangan BKAD Kab.Tapin



Netty Herawati, SE
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19820918 200701 2 006

Verifikator Keuangan



Muhammad Zaini, A.Md.Ak
 Pengatur
 NIP.19970920 202012 1 007

Unit Organisasi : Bidang Anggaran
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Menyusun dan melengkapi data dokumen KUA dan PPAS	Jumlah data KUA dan PPAS	2 Dokumen	0	0	2	0	2
2	Menyusun dan melengkapi data dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah data Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	0	0	2	0	2
3	Menyusun rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	0	0	0	1	1
4	Menyusun rancangan Perbub tentang Perhitungan Kemampuan Daerah	Jumlah rancangan Perbub tentang Perhitungan Kemampuan Daerah	1 Dokumen	0	0	1	0	1

Kabid. Anggaran BKAD Kab.Tapin



M. Ridhoriyadi Fakhrin, SE.Ak, MM
Penata Tk.I
NIP. 19850622 201001 1 017

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan




Rida Ahyani, SE
Penata Muda
NIP. 19940815 202012 2 005

Unit Organisasi : Bidang Anggaran
 Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Membantu penyusunan Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	2	2
2	Membantu penyusunan Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	2	2
3	Membantu penyusunan regulasi tentang penganggaran	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	0	0	4	4	8
4	Membantu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	0	58	58
5	Membantu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	0	0	0	58	58

Kasubid. Anggaran I BKAD Kab.Tapin


 Joni Ansyari, S. Kom, MM
 Penata
 NIP. 19740616 200501 1 011

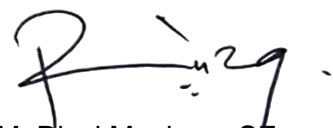
Pengadministrasi Anggaran


 Sofyan Arianto
 Pengatur
 NIP. 19810323 200701 1 019

Unit Organisasi : Bidang Perbendaharaan
 Unit Kerja : Sub Bidang Perbendaharaan II
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Mengoreksi Berkas SPP SPM, GU, TU dan LS	Jumlah Berkas SPP SPM, GU, TU dan LS	2500-3000 Berkas	500	1000	1200	1660	4360
2	Mencetak Register SP2D	Jumlah Register SP2D	12 Dokumen	3	3	3	3	12
3	Mencetak Laporan Penerimaan dan Pengeluaran KAS (BKU)	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran KAS (BKU)	12 Dokumen	3	3	3	3	12
4	Mencetak Laporan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	3	3	3	3	12
5	Membuat Surat Ralat Rekening	Jumlah Surat Ralat Rekening	10-20 Berkas	2	5	27	30	64

Kasubid. Perbendaharaan II BKAD Kab.Tapin



M. Rizqi Maulana, SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19870114 201001 1 007

Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

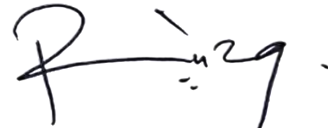


Rusliana, A.Md
 Pengatur
 NIP. 19830805 200901 2 002

Unit Organisasi : Bidang Perbendaharaan
Unit Kerja : Sub Bidang Perbendaharaan II
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Mengoreksi Berkas SPP SPM, GU, TU dan LS	Jumlah Berkas SPP SPM, GU, TU dan LS	2500-3000 Berkas	0	0	1200	1660	2860
2	Mencetak Register SP2D	Jumlah Register SP2D	6 Dokumen	0	0	3	3	6

Kasubid. Perbendaharaan II BKAD Kab.Tapin



M. Rizqi Maulana, SE
Penata Tk.I
NIP. 19870114 201001 1 007

Analisis Perbendaharaan




Netty Herawati, SE
Penata Muda Tk.I
19820918 200701 2 006


Unit Organisasi : Bidang Perbendaharaan
 Unit Kerja : Sub Bidang Perbendaharaan I
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Menginput data perubahan gaji PNS Kab.Tapin	Jumlah Data Perubahan Gaji PNS Kab.Tapin	160-180 Berkas	1481	1077	707	703	3968
2	Menginput daftar uang duka wafat, dan rapel PNS Kab.Tapin	Jumlah Daftar uang duka wafat dan Rapel PNS Kab.Tapin	12 Dokumen	3	3	3	3	12
3	Menginput Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP) Kab.Tapin	Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP) Kab.Tapin	12 Dokumen	3	3	3	3	12
4	Membuat laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT Taspem dan Taperum	Jumlah Laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	12 Dokumen	3	3	3	3	12
5	Mencetak daftar gaji PNS Kab.Tapin	Jumlah Daftar gaji PNS Kab.Tapin	14 Dokumen	3	5	3	3	14

Kasubid. Perbendaharaan I BKAD Kab.Tapin


 Hendra Yatmika, S.Kom
 Penata
 NIP. 19750606 200501 1 015

Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan


 Firman Hidayat
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19711005 199302 1 010

Unit Organisasi : Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 Unit Kerja : Sub Bidang Pembukuan
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Menghimpun dan mengumpulkan data terkait Pos-pos Neraca dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah data yang sesuai dengan akun Pos-pos Neraca	18 Dokumen	0	0	0	18	18
2	Mengolah Data Inventarisasi Pos-pos Neraca dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah data inventarisasi yang sesuai dengan data Po-pos Neraca	90 Berkas	9	0	35	46	90
3	Melaksanakan Rekonsiliasi data Keuangan Daerah (Rekening Koran Kas Daerah & STS)	Jumlah rekening koran kas daerah & STS	800 Berkas	50	150	250	350	800

Kasubid. Pembukuan BKAD Kab.Tapin



Agus Ronnyadi, S. Kom
 Penata
 NIP. 19760828 200501 1 012

Pengelola Akuntansi



Erma Susanti, A.Md
 Pengatur Tk.I
 NIP. 19880115 201503 2 001

Unit Organisasi : Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 Unit Kerja : Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Mengumpulkan, menghimpun data untuk penyusunan LKPD	Jumlah data Kas FKTP, Piutang dan Penyisihan Piutang, Persediaan	3 Laporan	3				3
		Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi Keuangan SKPD	9 Laporan	9				9
2	Mengumpulkan dan memverifikasi data terkait JKN dan SP2B JKN	Jumlah data JKN dan SP2B JKN	156 Dokumen	36	36	36	36	144
3	Mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis data dalam rangka penyusunan ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	2 Berkas		2			2

Plt.Kasubid. Pelaporan Keuangan BKAD Kab.Tapin



Agus Ronnyadi, S. Kom
 Penata
 NIP. 19760828 200501 1 012

Pengolah Data Laporan Keuangan



Miftahurrahmah, S.Ak
 Penata Muda
 NIP. 19900402 201503 2 003

Unit Organisasi : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Unit Kerja : Sub Bidang Pembukuan

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Mengumpulkan dan menyiapkan data hasil inventarisasi pos-pos laporan keuangan sesuai data keuangan daerah yang mutakhir untuk bahan penyusunan laporan keuangan daerah	Jumlah data hasil inventarisasi pos-pos laporan keuangan	45 Dokumen	45				45
2	Mengumpuland dan merekonsiliasi data transaksi keuangan daerah Kabupaten Tapin dengan data keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk bahan konsolidasi laporan keuangan daerah	Jumlah data rekonsiliasi laporan keuangan seluruh SKPD	12 Dokumen	3	3	3	3	12
3	Mengumpulkan dan merekonsiliasi data keuangan daerah yang bersumber dari dana kapitalisasi sesuai prosedur yang berlaku untuk konsolidasi laporan keuangan daerah	Jumlah data rekonsiliasi dana kapitalisasi seluruh JKN	156 Dokumen	39	39	39	39	156

Kasubid. Pembukuan BKAD Kab.Tapin



Agus Rommyadi, S. Kom

Penata

NIP. 19760828 200501 1 012

Penata Laporan Keuangan



Rezky Maulida, SE

Penata Muda

NIP. 19911007 202012 2 007

Unit Organisasi : Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 Unit Kerja : Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Tw 1	Realisasi Tw 2	Realisasi Tw 3	Realisasi Tw 4	Total
1	Mengumpulkan dan merekonsiliasi data dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah data rekonsiliasi dana BOS	197 Data	197				197
2	Mengumpulkan dan merekonsiliasi data dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah data rekonsiliasi dan BLUD	4 Berkas	1	1	1	1	4
3	Mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis data dalam rangka penyusunan ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	2 Berkas	2				2
4	Mengumpulkan, menghimpun data untuk penyusunan LKPD	Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi Keuangan SKPD	9 Laporan	9				9

Plt.Kasubid. Pelaporan Keuangan BKAD Kab.Tapin



Agus Ronnyadi, S. Kom
 Penata
 NIP. 19760828 200501 1 012

Penata Keuangan



Fitri Norkomariah Yustin, S.Ak
 Penata Muda
 NIP. 19940615 202012 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31894

Undangan
Rapat Koordinasi Bulanan

Rantau, 3 Februari 2022

Kepada Yth ;
Sekretaris, Kabid dan
Kasubbid, Kasubag Serta Staf
Dan Tenaga Kontrak BKAD
Kabupaten Tapin

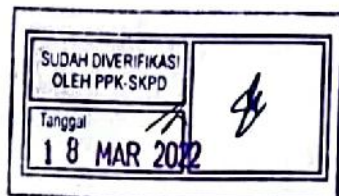
Di -
Tempat.

Dalam Rangka Rapat Koordinasi Bulanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Schubungan dengan tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Kaban BKAD Kab. Tapin.

Demikian kami sampaikan surat undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin,



DR. H. SUFIAN SYAH, M.AP.
NIP.19700710199003 1 002

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI BULANAN

Hari/Tanggal Kamis, 3 Februari 2022
Jam/Pukul : 09.00 s/d Selesai

No	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN
1	Dr. H. SUFIANSYAH, M.AP NIP.19700616 199003 1 002	KEPALA BADAN	II /B	1
2	HARIS FADHILAH, SE, MM NIP.19740626 200501 1 005	SEKRETARIS	III /A	2
3	MITYA, SE NIP.19680305 199603 2 005	KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	III /B	3
4	H. SUPIAN NOOR, S.IP NIP.19741110 199403 1 012	KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	III /B	4
5	MUHAMMAD ANSHARY, S.SOS NIP.19731020 200604 1 016	KABID. PERBENDAHARAAN	III /B	5
6	M.RIDHORİYADI..F, SE.Ak, MM NIP.19850622 201001 1 017	KABID. ANGGARAN	III /B	6
7	MISRY KHAULANY, SE. NIP.19730623 200501 1 011	KASUBAG. KEUANGAN	IV/A	7
8	M. RIZQI MAULANA, SE. NIP.19870114 201001 1 007	KASUBID. PERBENDAHARAAN II	IV/A	8
9	ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19760903 200012 1 006	KASUBID. ANGGARAN II	IV/A	9
10	HENDRA YATMIKA, S.KOM NIP.19750606 200501 1 015	KASUBID. PERBENDAHARAAN I	IV/A	10
11	FITRI ROLYANI, S.AP, MM NIP.19820723 200701 2 005	KASUBID. PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	IV/A	11
12	AGUS RONNYADI, S. Kom. NIP.19760828 200501 1 012	KASUBID. PEMBUKUAN	IV/A	12
13	AHMAT RAPI'IN, S.Kom NIP.19790906 200904 1 003	KASUBID. PENATAUSAHAAN	IV/A	13
14	JONI ANSYARI, S. Kom, MM NIP.19740616 200501 1 011	KASUBID. ANGGARAN I	IV/A	14
15	DANIEL RAHMATULLAH, SKM NIP.19860809 201001 1 011	KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN	IV/A	15
16	ABDUL RAZAK, S.KOM NIP.19740604 200904 1 003	KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN	IV/A	16
17	SURJANSYAH, SE NIP.19760123 201001 1 014	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH		17
18	IKA MAYASARI, ST. NIP.19860226 201503 2 002	ANALIS KEBIJAKAN		18
19	RAHMALINDA, SE NIP.19861204 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH		19
20	EMERZI HABIBA, SE NIP.19821116 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH		20
21	RULLY PERDHANA, S.Kom NIP.19830511 200904 1 003	PRAKOM AHLI MUDA		21
22	MIFTAHURRAHMAH, S.Ak NIP.19900402 201503 2 003	PELAKSANA PELAPORAN KEUANGAN		22
23	ANJAR GUSTI DKS, S.M NIP.19801203 200604 2 001	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		23

	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
	RUSLIANA, A.Md NIP.19830805 200901 2 002	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		24
25	ADRIANSYAH, A. Md NIP.19780921 200904 1 001	PELAKSANA KEUANGAN	25	
26	ERMA SUSANTI, A.Md NIP.19880115 201503 2 001	PELAKSANA PEMBUKUAN		26
27	FIRMAN HIDAYAT NIP.19711005 199302 1 010	PELAKSANA PERBENDAHARAAN	27	
28	SOFYAN ARIYANTO NIP.19810323 200701 1 019	PELAKSANA ANGGARAN		28
29	REZKY MAULIDA, SE NIP.19911007 202012 2 007	PENATA LAPORAN KEUANGAN	29	
30	FITRI NORKOMARIAH YUSTIN, S.Ak NIP.19940615 202012 2 014	PENATA KEUANGAN		30
31	RIDA AHYANI, SE NIP.19940815 202012 2 005	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	31	
32	MUHAMMAD ZAINI, A.Md.Ak NIP.19970920 202012 1 007	VERIFIKATOR KEUANGAN		32
33	ALI NAPARIN	Tenaga Kontrak	33	
34	BAYU SAPUTRA, S. KOM	Tenaga Kontrak		34
35	IKHWANUR RAHMAN, S.Kom, M.Eng	Tenaga Kontrak	35	
36	MUHAMMAD ADAM, SE	Tenaga Kontrak		36
37	RAHMAN	Tenaga Kontrak	37	
38	TASKIA ALYA AZZAHRA	Tenaga Kontrak		38
39	SRI RAHAYU	Tenaga Kontrak	39	
40	RODY ADENAN	Tenaga Kontrak		40
41	YUSENI	Tenaga Kontrak	41	
42	AULIYAH, SE	Tenaga Kontrak		42
43	RIFQI AKHYAD	Tenaga Kontrak	43	
44	MUHAMMAD ZAINI	Tenaga Kontrak		44
45	AHMAD MAULIDI KURNIAWAN	Tenaga Kontrak	45	
46	AHMAD REZKI TAUFAN FIRDAUS	Tenaga Kontrak		46
47	M. IKHSAN NUR RIZKY	Tenaga Kontrak	47	
48	AMELYA	Tenaga Kontrak		48
49	MUHAMMAD MUJAHIDIN	Tenaga Kontrak	49	
50	M.RIZKI ADITYA ANWAR, S.M	Tenaga Kontrak		50
51	ARIF RAHMAN, S.Kom	Tenaga Kontrak	51	
53	MUHAMMAD BURHANUDDIN	Tenaga Kontrak		52
53	NAJAMUDDIN AZHARI	Tenaga Kontrak	53	



PEMBAUT DOKUMEN,

AHMAD MAULIDI KURNIAWAN

NOTULEN RAPAT

1. Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Bulanan,
2. Hari / Tgl : Kamis / 03-Februari-2022
3. Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
4. Tempat : Ruang Kepala Badan BKAD Kab. Tapin
5. Peserta : Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid,
Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) BKAD Kabupaten Tapin.

Isi Notulen :

Rapat di hadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) BKAD Kabupaten Tapin.

Rapat di laksanakan di Ruang Kepala BKAD Tapin, rapat koordinasi bulanan merupakan kegiatan rutin bulanan dalam rangka mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan di laksanakan selanjutnya.

Kepala Badan DR. H. Sufiansyah, M.AP, mengharapkan kepada semua Kabid untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2022.

Rapat koordinasi kali ini dilaksanakan di Ruang Kepala BKAD karena Aula BKAD di pakai Tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pemeriksaan awal Laporan SKPD Pemkab Tapin.

Rapat berlangsung dengan lancar dan kondusif, dan diakhiri dengan pembacaan doa.



Pembuat laporan,

Abdul Razak, S.Kom

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV PER-TRIWULAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab
						I		II		III		IV																
						7		8		9		10		11		12												
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16								
		5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	%	10.988.550.432	25	%	722.498.986								25,00	%	722.498.986	25,00	6,58	25,00	%	722.498.986	25,00	6,58		
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12	Bulan	30.345.000	3	Bulan	3.940.000								3,00	Bulan	3.940.000	25,00	12,98	3,00	Bulan	3.940.000	25,00	12,98	Sekretaris	
		5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1.800.000	3	Dokumen	0								3	Dokumen	-	50,00	0,00	3	Dokumen	-	50,00	0,00	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	
		5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	28.545.000	4	Dokumen	3.940.000								4	Dokumen	3.940.000	57,14	13,80	4	Dokumen	3.940.000	57,14	13,80	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			53,57	6,90								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			R	SR								
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.477.504.202	25	%	433.798.826								25,00	%	433.798.826	25,00	6,70	25,00	%	433.798.826	25,00	6,70	Sekretaris	
		5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.440.650.202	3	Bulan	429.037.726								3	Bulan	429.037.726	25,00	6,66	3	Bulan	429.037.726	25,00	6,66	Kasubag Keuangan	
		5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	3.809.000	1	Dokumen									1	Dokumen	-	100,00	0,00	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Kasubag Keuangan	
		5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Dokumen	33.045.000	4	Dokumen	4.761.100								4	Dokumen	4.761.100	25,00	14,41	4	Dokumen	4.761.100	25,00	14,41	Kasubag Keuangan	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			50,00	7,02								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR								
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	54.094.450	0	%	0								0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00	Kabid Perbendaharaan	
		5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	1	Kegiatan	54.094.450	0	Kegiatan	0								0	Kegiatan	-	0,00	0,00	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan I	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			0,00	0,00								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR								
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.418.762.340	25	%	200.053.409								25,00	%	200.053.409	25,00	8,27	25,00	%	200.053.409	25,00	8,27	Sekretaris	
		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	129.493.340	3	Bulan	500.000								3	Bulan	500.000	25,00	0,39	3	Bulan	500.000	25,00	0,39	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	833.679.600	3	Bulan	0								3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	10.028.600	3	Bulan	0								3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	261.266.200	3	Bulan	16.695.000								3	Bulan	16.695.000	25,00	6,39	3	Bulan	16.695.000	25,00	6,39	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	99.810.000	3	Bulan	1.599.300								3	Bulan	1.599.300	25,00	1,60	3	Bulan	1.599.300	25,00	1,60	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12	Bulan	49.409.600	3	Bulan	0								3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	29.974.000	3	Bulan	7.370.000								3	Bulan	7.370.000	25,00	24,59	3	Bulan	7.370.000	25,00	24,59	Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.005.101.000	3	Bulan	173.889.109								3	Bulan	173.889.109	25,00	17,30	3	Bulan	173.889.109	25,00	17,30	Kasubag Umum & Kepegawaian	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			25,00	6,28								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR								

		5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	58	Dokumen	36.270.000	0	Dokumen	0									0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran II																			
		5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	836.332.600	0	Dokumen	6.650.000									0	Dokumen	6.650.000	0,00	0,80	0	Dokumen	6.650.000	0,00	0,80	Kasubid Anggaran I																			
		5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD-P yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	140.510.100	0	Dokumen	0									0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran II																			
		5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	4	Dokumen	266.699.900	0	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	10.000.000	0,00	3,75	0	Dokumen	10.000.000	0,00	3,75	Kasubid Anggaran I																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					11,11	4,41																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR																									
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kejadian komplain	100	%	719.464.000	25	%	29.500.000									25,00	%	29.500.000	25,00	4,10	25,00	%	29.500.000	25,00	4,10	Kabid Perbendaharaan																			
		5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi bank	12	Laporan	78.420.000	3	Laporan	0									3	Laporan	-	25,00	0,00	3	Laporan	-	25,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan II																			
		5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	4	Triwulan	43.212.000	1	Triwulan	5.500.000									1	Triwulan	5.500.000	25,00	12,73	1	Triwulan	5.500.000	25,00	12,73	Kasubid Perbendaharaan I																			
		5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2	Dokumen	15.100.000	0	Dokumen	0									0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan III																			
		5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan DAK dan DID	46	Dokumen	147.040.000	30	Dokumen	0									30	Dokumen	-	65,22	0,00	30	Dokumen	-	65,22	0,00	Kasubid Perbendaharaan II																			
		5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	2	Dokumen	10.100.000	0	Dokumen	0									0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan III																			
		5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12	Bulan	81.152.000	3	Bulan	0									3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan I																			
		5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah sidur, perda penatausahaan keuangan, dan SK pengelolaan keuangan daerah	17	Dokumen	127.560.000	16	Dokumen	0									16	Dokumen	-	94,12	0,00	16	Dokumen	-	94,12	0,00	Kasubid Perbendaharaan II																			
		5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	12	Bulan	216.880.000	3	Bulan	24.000.000									3	Bulan	24.000.000	25,00	11,07	3	Bulan	24.000.000	25,00	11,07	Kasubid Perbendaharaan I																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					32,42	2,97																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR																									
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	538.000.000	25	%	5.000.000									25,00	%	5.000.000	25,00	0,93	25,00	%	5.000.000	25,00	0,93	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	12	Bulan	47.090.000	3	Bulan	5.000.000									3	Bulan	5.000.000	25,00	10,62	3	Bulan	5.000.000	25,00	10,62	Kasubid Pembukuan																			
		5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1	Dokumen	32.290.000	1	Dokumen	0									1	Dokumen	-	100,00	0,00	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																			

		5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	16	Dokumen	121.610.000	4	Dokumen	0											4	Dokumen	-	25,00	0,00	4	Dokumen	-	25,00	0,00	Kasubid Evaluasi & Pertanggungjawaban APBD																						
		5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	6	Bulan	196.250.000	3	Bulan	0											3	Bulan	-	50,00	0,00	3	Bulan	-	50,00	0,00	Kabid Akuntansi & Pelaporan																						
		5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda dan rancangan perub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	Dokumen	59.580.000	0	Dokumen	0											0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kabid Akuntansi & Pelaporan																						
		5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	1	Dokumen	27.220.000	0	Dokumen	0											0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																						
		5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sidur akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	1	Dokumen	27.220.000	0	Dokumen	0											0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pembukuan																						
		5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	45	SKPD	26.740.000	0	SKPD	0											0	SKPD	-	0,00	0,00	0	SKPD	-	0,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																						
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	25,00	1,33																												
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	SR	SR																												
																						Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	25,00	2,34																												
																						Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR																												
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100	%	1.109.119.500	0	%	120.641.400											0,00	%	120.641.400	0,00	10,88	0,00	%	120.641.400	0,00	10,88																							
		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	%	1.109.119.500	0	%	120.641.400											0,00	%	120.641.400	0,00	10,88	0,00	%	120.641.400	0,00	10,88	Kabid Pengelolaan BMD																						
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100	%		0	%													0,00		%		0,00	0,00		%			0,00																					
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	95	%		0	%															0,00		%	0,00		0,00			%	0,00																				
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100	%		0	%															0,00		%	0,00		0,00			%	0,00																				
		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1	Dokumen	286.781.000	0	Dokumen	59.865.200											0	Dokumen	59.865.200	0,00	20,87	0	Dokumen	59.865.200	0,00	20,87	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																						
		5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1	Dokumen	6.630.000	0	Dokumen	0											0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																						
		5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPMD	2	Dokumen	105.592.900	0	Dokumen	0											0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																						
		5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12	Bulan	179.085.000	3	Bulan	4.000.000											3	Bulan	4.000.000	25,00	2,23	3	Bulan	4.000.000	25,00	2,23	Kasubid Penatausahaan																						
		5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12	Bulan	12.697.900	3	Bulan	0											3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubid Penatausahaan																						
		5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12	Bulan	34.032.000	3	Bulan	0											3	Bulan	-	25,00	0,00	3	Bulan	-	25,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																						
		5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1	Kegiatan	112.185.900	0	Kegiatan	0											0	Kegiatan	-	0,00	0,00	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan																						
		5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100	%	262.351.400	25	%	48.526.200											25	%	48.526.200	25,00	18,50	25	%	48.526.200	25,00	18,50	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan																						



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

Undangan
Rapat Koordinasi Evaluasi Bulanan

Rantau, 27 Mei 2022

Kepada Yth ;
Sekretaris, Kabid dan
Kasubbid, Kasubag Serta Staf
BKAD Kab. Tapin Tapin

Di -
Tempat.

Dalam Rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Bulanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Sehubungan dengan tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula BKAD Kab. Tapin.

Demikian kami sampaikan surat undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin
Kepala,



DR. H. SUFIANSYAH, M.A.P.
NIP.19700616 199003 1 002



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN
















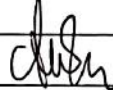



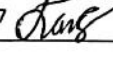





DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI EVALUASI BULANAN

ri/Tanggal : Senin, 30 Mei 2022

Jam/Pukul : 09.00 s/d Selesai

No	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN
1	Dr. H. SUFIANSYAH, M.AP NIP.19700616 199003 1 002	KEPALA BADAN	II / B	1
2	HARIS FADHILAH, SE, MM NIP.19740626 200501 1 005	SEKRETARIS	III / A	2
3	MUHAMMAD ANSHARY, S.SOS NIP.19731020 200604 1 016	KABID. PERBENDAHARAAN	III / B	3
4	M I T Y A, SE NIP.19680305 199603 2 005	KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	III / B	4
5	H. SUPIAN NOOR, S.IP NIP.19741110 199403 1 012	KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	III / B	5
6	M.RIDHORIYADI..F, SE.Ak, MM NIP.19850622 201001 1 017	KABID. ANGGARAN	III / B	6
7	MISRY KHAULANY, SE. NIP.19730623 200501 1 011	KASUBAG. KEUANGAN	IV/A	7
8	DANIEL RAHMATULLAH, SKM NIP.19860809 201001 1 011	KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN	IV/A	8
9	ABDUL RAZAK, S.KOM NIP.19740604 200904 1 003	KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN	IV/A	9
10	HENDRA YATMIKA, S.KOM NIP.19750606 200501 1 015	KASUBID. PERBENDAHARAAN I	IV/A	10
11	M. RIZQI MAULANA, SE. NIP.19870114 201001 1 007	KASUBID. PERBENDAHARAAN II	IV/A	11
12	EMERZI HABIBA, SE NIP.19821116 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	12
13	AGUS RONNYADI, S. Kom. NIP.19760828 200501 1 012	KASUBID. PEMBUKUAN	IV/A	13
14	RAHMALINDA, SE NIP.19861204 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	14
15	IKA MAYASARI, ST. NIP.19860226 201503 2 002	ANALIS KEBIJAKAN	IV/A	15
16	AHMAT RAPI'IN, S. Kom NIP.19790906 200904 1 003	KASUBID. PENATAUSAHAAN	IV/A	16
17	FITRI ROLYANI, S.AP, MM NIP.19820723 200701 2 005	KASUBID. PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	IV/A	17
18	JONI ANSYARI, S. Kom, MM NIP.19740616 200501 1 011	KASUBID. ANGGARAN I	IV/A	18
19	ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19760903 200012 1 006	KASUBID. ANGGARAN II	IV/A	19
20	SURIANSYAH, SE NIP.19760123 201001 1 014	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	20
21	FIRMAN HIDAYAT NIP.19711005 199302 1 010	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		21
22	ANJAR GUSTI DKS, S.M NIP.19801203 200604 2 001	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		22
23	ADAM KHAIRUN, S.T NIP.198708292015031002	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH		23
24	ADRIANSYAH, A. Md NIP.19780921 200904 1 001	PELAKSANA KEUANGAN		24

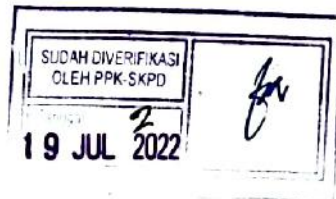
No	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
25	RUSLIANA, A.Md NIP.19830805 200901 2 002	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		25	
26	ERMA SUSANTI, A.Md NIP.19880115 201503 2 001	PELAKSANA PEMBUKUAN			26 
27	MIFTAHURRAHMAH, S.Ak NIP.19900402 201503 2 003	PELAKSANA PELAPORAN KEUANGAN		27	
28	SOFYAN ARIYANTO NIP.19810323 200701 1 019	PELAKSANA ANGGARAN			28 
29	REZKY MAULIDA, SE NIP.19911007 202012 2 007	PENATA LAPORAN KEUANGAN		29	
30	FITRI NORKOMARIAH YUSTIN, S.Ak NIP.19940615 202012 2 014	PENATA KEUANGAN			30 
31	RIDA AHYANI, SE NIP.19940815 202012 2 005	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		31	
32	MUHAMMAD ZAINI, A.Md.Ak NIP.19970920 202012 1 007	VERIFIKATOR KEUANGAN			32 
33	NETTY HERAWATI, SE NIP.19820918 200701 2 006	ANALIS PERBENDAHARAAN		33	
34	ALI NAPARIN	PTT			34 
35	BAYU SAPUTRA, S. KOM	PTT		35	
36	IKHWANUR RAHMAN, S.Kom, M.Eng	PTT			36 
37	MUHAMMAD ADAM, SE	PTT		37	
38	RAHMAN	PTT			38 
39	TASKIA ALYA AZZAHRA	PTT		39	
40	SRI RAHAYU	PTT			40
41	RODY ADENAN	PTT		41	
42	YUSENI	PTT			42 
43	AULIYAH, SE	PTT		43	
44	RIFQI AKHYAD	PTT			44 
45	MUHAMMAD ZAINI	PTT		45	
46	AHMAD MAULIDI KURNIAWAN	PTT			46 
47	AHMAD REZKI TAUFAN FIRDAUS	PTT		47	
48	M. IKHSAN NUR RIZKY	PTT			48 
49	AMELYA	PTT		49	
50	MUHAMMAD MUJAHIDIN	PTT			50
51	M.RIZKI ADITYA ANWAR, S.M	PTT		51	
52	ARIF RAHMAN, S.Kom	PTT			52 
53	MUHAMMAD BURHANUDDIN	PTT		53	
54	NAJAMUDDIN AZHARI	PTT			54 

No	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
55	ANITA	PTT		55 <i>Anita</i>	
56	AFIFAH HASANAH	PTT			56 <i>AFIFAH</i>
57	MUHAMMAD RIZKI ASWANDI	PTT		57 <i>A</i>	
58	TSANA NAFISAH RIDHA	PTT			58
59	MUHAMMAD RUSNI			59	
60					60
61				61	
62					62
63				63	
64					64
65				65	

PEMBUAT DOKUMEN,



AHMAD MAULIDI KURNIAWAN



NOTULEN RAPAT

1. Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Bulanan.
2. Hari / Tgl : Senin / 30-Mei-2022
3. Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
4. Tempat : Aula BKAD Kab. Tapin
5. Peserta : Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Tenaga Kontrak BKAD Kabupaten Tapin.

Isi Notulen :

Rapat di hadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Tenaga Kontrak BKAD Kabupaten Tapin.

Rapat di laksanakan di Aula Kantor BKAD Tapin, dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan semua bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin (BKAD).

Kepala Badan mengingatkan kembali kepada semua Bidang untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pembuat laporan,



Abdul Razak, S.Kom



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV PER-TRIWULAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		14 = 12		15 = 13		16			
		5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	%	10.988.550.432	25	%	722.498.986	50	%	3.657.518.855			50,00	%	3.657.518.855	50,00	33,28	50,00	%	3.657.518.855	50,00	33,28	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12	Bulan	30.345.000	3	Bulan	3.940.000	6	Bulan	11.444.300			6,00	Bulan	11.444.300	50,00	37,71	6,00	Bulan	11.444.300	50,00	37,71	Sekretaris
		5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1.800.000	3	Dokumen	0	3	Dokumen	-			3	Dokumen	-	50,00	0,00	3	Dokumen	-	50,00	0,00	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
		5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	28.545.000	4	Dokumen	3.940.000	5	Dokumen	11.444.300			5	Dokumen	11.444.300	71,43	40,09	5	Dokumen	11.444.300	71,43	40,09	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																60,71	20,05								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																R	SR								
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.477.504.202	25	%	433.798.826	60	%	2.109.021.018			60,00	%	2.109.021.018	60,00	32,56	60,00	%	2.109.021.018	60,00	32,56	Sekretaris
		5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.440.650.202	3	Bulan	429.037.726	6	Bulan	2.093.835.418			6	Bulan	2.093.835.418	50,00	32,51	6	Bulan	2.093.835.418	50,00	32,51	Kasubag Keuangan
		5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	3.809.000	1	Dokumen		1	Dokumen	2.704.500			1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	Kasubag Keuangan
		5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Dokumen	33.045.000	4	Dokumen	4.761.100	5	Dokumen	12.481.100			5	Dokumen	12.481.100	31,25	37,77	5	Dokumen	12.481.100	31,25	37,77	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																60,42	47,09								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																R	SR								
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	54.094.450	0	%	0	100	%	35.927.900			100,00	%	35.927.900	100,00	66,42	100,00	%	35.927.900	100,00	66,42	Kabid Perbendaharaan
		5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	1	Kegiatan	54.094.450	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	35.927.900			1	Kegiatan	35.927.900	100,00	66,42	1	Kegiatan	35.927.900	100,00	66,42	Kasubid Perbendaharaan I
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	66,42								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	S								
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.418.762.340	25	%	200.053.409	50	%	1.173.700.324			50,00	%	1.173.700.324	50,00	48,52	50,00	%	1.173.700.324	50,00	48,52	Sekretaris
		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	129.493.340	3	Bulan	500.000	6	Bulan	2.448.000			6	Bulan	2.448.000	50,00	1,89	6	Bulan	2.448.000	50,00	1,89	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	833.679.600	3	Bulan	0	6	Bulan	468.959.905			6	Bulan	468.959.905	50,00	56,25	6	Bulan	468.959.905	50,00	56,25	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	10.028.600	3	Bulan	0	6	Bulan	-			6	Bulan	-	50,00	0,00	6	Bulan	-	50,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	261.266.200	3	Bulan	16.695.000	6	Bulan	45.026.125			6	Bulan	45.026.125	50,00	17,23	6	Bulan	45.026.125	50,00	17,23	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	99.810.000	3	Bulan	1.599.300	6	Bulan	14.247.200			6	Bulan	14.247.200	50,00	14,27	6	Bulan	14.247.200	50,00	14,27	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12	Bulan	49.409.600	3	Bulan	0	6	Bulan	-			6	Bulan	-	50,00	0,00	6	Bulan	-	50,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	29.974.000	3	Bulan	7.370.000	6	Bulan	9.305.000			6	Bulan	9.305.000	50,00	31,04	6	Bulan	9.305.000	50,00	31,04	Kasubag Umum & Kepegawaian

		5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.005.101.000	3	Bulan	173.889.109	6	Bulan	633.714.094						6	Bulan	633.714.094	50,00	63,05	6	Bulan	633.714.094	50,00	63,05	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		50,00	22,97																											
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR																											
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100	%	819.748.000	0	%	0	0	%	0						0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00	Sekretaris																							
		5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61	Unit	819.748.000	0	Unit	0	0	Unit	0						0	Unit	-	0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00																											
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR																											
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	822.653.040	25	%	59.106.751	50	%	188.718.113						50,00	%	188.718.113	50,00	22,94	50,00	%	188.718.113	50,00	22,94	Sekretaris																							
		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	8.700.000	3	Bulan	0	6	Bulan	1.500.000						6	Bulan	1.500.000	50,00	17,24	6	Bulan	1.500.000	50,00	17,24	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
		5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	344.330.000	3	Bulan	31.709.090	6	Bulan	104.631.459						6	Bulan	104.631.459	50,00	30,39	6	Bulan	104.631.459	50,00	30,39	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
		5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	469.623.040	3	Bulan	27.397.661	6	Bulan	82.586.654						6	Bulan	82.586.654	50,00	17,59	6	Bulan	82.586.654	50,00	17,59	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		50,00	21,74																											
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR																											
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	365.443.400	25	%	25.600.000	50	%	138.707.200						50,00	%	138.707.200	50,00	37,96	50,00	%	138.707.200	50,00	37,96	Sekretaris																							
		5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	78.007.900	3	Bulan	20.100.000	6	Bulan	29.149.700						6	Bulan	29.149.700	50,00	37,37	6	Bulan	29.149.700	50,00	37,37	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
		5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	37.470.000	3	Bulan	3.500.000	6	Bulan	5.800.000						6	Bulan	5.800.000	50,00	15,48	6	Bulan	5.800.000	50,00	15,48	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
		5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	249.965.500	3	Bulan	2.000.000	6	Bulan	103.757.500						6	Bulan	103.757.500	50,00	41,51	6	Bulan	103.757.500	50,00	41,51	Kasubag Umum & Kepegawaian																							
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		50,00	31,45																											
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR																											
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		51,43	35,16																											
																					Predikat Kinerja Kegiatan		R	SR																											
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12	%	2.733.306.600	0	%	63.890.000	0	%	510.172.600						0,00	%	510.172.600	0,00	18,67	0,00	%	510.172.600	0,00	18,67																								
			Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	%		0	%		0	%							0,00	%		0,00		0,00	%		0,00																									
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	%		100	%		100	%							100	%		100,00		100,00	%		100,00																									
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97	Nilai		0	Nilai		0	Nilai						0,00	Nilai		0,00		0,00	Nilai		0,00																										
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	1.475.842.600	25	%	29.390.000	50	%	344.830.000						50,00	%	344.830.000	50,00	23,36	50,00	%	344.830.000	50,00	23,36	Kabid Anggaran																							
		5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	Dokumen	72.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran III																								
		5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	69.800.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran III																								
		5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58	Dokumen	9.020.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran I																								

		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	538.000.000	25	%	5.000.000	50	%	53.514.100						50,00	%	53.514.100	50,00	9,95	50,00	%	53.514.100	50,00	9,95	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Daerah	12	Bulan	47.090.000	3	Bulan	5.000.000	6	Bulan	16.070.000						6	Bulan	16.070.000	50,00	34,13	6	Bulan	16.070.000	50,00	34,13	Kasubid Pembukuan																			
			Waktu Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan SKPD	12	Bulan																																										
		5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Waktu Kompilasi Laporan Keuangan BLUD, JKN, dan BOS	12	Bulan	32.290.000	1	Bulan	0	1	Dokumen	-						1	Bulan	-	8,33	0,00	1	Bulan	-	8,33	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
		5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	Dokumen	121.610.000	4	Dokumen	0	5	Dokumen	2.426.900						5	Dokumen	2.426.900	166,67	2,00	5	Dokumen	2.426.900	166,67	2,00	Kasubid Evaluasi & Pertanggungjawaban APBD																			
			Waktu Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Bulan				Bulan											Bulan																											
			Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi keuangan SKPD	9	Laporan				Laporan												Laporan																										
			Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	3	Berkas				Berkas												Berkas																										
		5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	6	Bulan	196.250.000	3	Bulan	0	6	Bulan	35.017.200						6	Bulan	35.017.200	100,00	17,84	6	Bulan	35.017.200	100,00	17,84	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
		5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda dan rancangan perbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	Dokumen	59.580.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
		5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	1	Dokumen	27.220.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
		5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdur akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	1	Dokumen	27.220.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-						0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pembukuan																			
		5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12	Bulan	26.740.000	0	Bulan	0	0	SKPD	-						0	Bulan	-	0,00	0,00	0	Bulan	-	0,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
																				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		40,63	6,75																								
																				Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR																								
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		50,00	16,29																								
																				Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR																								
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100	%	1.109.119.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500						0,00	%	319.688.500	0,00	28,82	0,00	%	319.688.500	0,00	28,82																				
		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	%	1.109.119.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500						0,00	%	319.688.500	0,00	28,82	0,00	%	319.688.500	0,00	28,82	Kabid Pengelolaan BMD																			
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100	%			0		%			0	%							0,00		%			0,00				0,00	%		0,00														
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	95	%			0		%			0	%							0,00		%			0,00				0,00	%		0,00														
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100	%			0		%			0	%							0,00		%			0,00				0,00	%		0,00														
		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1	Dokumen	286.781.000	0	Dokumen	59.865.200	1	Dokumen	184.680.200						1	Dokumen	184.680.200	100,00	64,40	1	Dokumen	184.680.200	100,00	64,40	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																			



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

undangan
Rapat Koordinasi Evaluasi Bulanan

Rantau, 26 Juli 2022

Kepada Yth ;
Sekretaris, Kabid dan
Kasubbid, Kasubag Serta Staf
BKAD Kab. Tapin Tapin

Di -
Tempat.

Dalam Rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Bulanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Sehubungan dengan tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

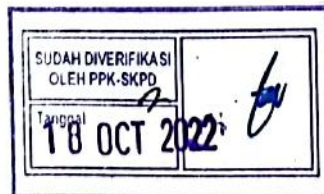
H a r i : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2022
Waktu : 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula BKAD Kab. Tapin.

Demikian kami sampaikan surat undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin
Kepala,



DR. H. SUFIANSYAH, M.AP.
NIP:19700616 199003 1 002



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI EVALUASI BULANAN

Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Pukul : 09.00 s/d Selesai

1	2	3	4	5
	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN
1	Dr. H. SUFIANSYAH, M.AP NIP.19700616 199003 1 002	KEPALA BADAN	II / B	1
2	HARIS FADHILAH, SE, MM NIP.19740626 200501 1 005	SEKRETARIS	III / A	2
3	MUHAMMAD ANSHARY, S.SOS NIP.19731020 200604 1 016	KABID. PERBENDAHARAAN	III / B	3
4	H. SUPIAN NOOR, S.IP NIP.19741110 199403 1 012	KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	III / B	4
5	M.RIDHORIYADI..F, SE,AK, MM NIP.19850622 201001 1 017	KABID. ANGGARAN	III / B	5
6	MISRY KHAULANY, SE. NIP.19730623 200501 1 011	KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	III / B	6
7	DANIEL RAHMATULLAH, SKM NIP.19860809 201001 1 011	KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN	IV/A	7
8	ABDUL RAZAK, S.KOM NIP.19740604 200904 1 003	KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN	IV/A	8
9	HENDRA YATMIKA, S.KOM NIP.19750606 200501 1 015	KASUBID. PERBENDAHARAAN I	IV/A	9
10	M. RIZQI MAULANA, SE. NIP.19870114 201001 1 007	KASUBID. PERBENDAHARAAN II	IV/A	10
11	EMERZI HABIBA, SE NIP.19821116 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	11
12	AGUS RONNYADI, S. Kom. NIP.19760828 200501 1 012	KASUBID. PEMBUKUAN	IV/A	12
13	RAHMALINDA, SE NIP.19861204 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	13
14	IKA MAYASARI, ST. NIP.19860226 201503 2 002	ANALIS KEBIJAKAN	IV/A	14
15	AHMAT RAPTIN, S.Kom NIP.19790906 200904 1 003	KASUBID. PENATAUSAHAAN	IV/A	15
16	FITRI ROLYANI, S.AP, MM NIP.19820723 200701 2 005	KASUBID. PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	IV/A	16
17	JONI ANSYARI, S. Kom, MM NIP.19740616 200501 1 011	KASUBID. ANGGARAN I	IV/A	17
18	ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19760903 200012 1 006	KASUBID. ANGGARAN II	IV/A	18
19	SURIANSYAH, SE NIP.19760123 201001 1 014	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	IV/A	19
20	FIRMAN HIDAYAT NIP.19711005 199302 1 010	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		20
21	ANJAR GUSTI DKS, S.M NIP.19801203 200604 2 001	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		21
22	ADAM KHAIRUN, S.T NIP.198708292015031002	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH		22
23	ADRIANSYAH, A. Md NIP.19780921 200904 1 001	PELAKSANA KEUANGAN		23



NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	TANDA TANGAN
2	3	4	5
USLIANA, A.Md NIP.19830805 200901 2 002	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		24
ADRIANSYAH, A. Md NIP.19780921 200904 1 001	PELAKSANA KEUANGAN	25	
26 ERMA SUSANTI, A.Md NIP.19880115 201503 2 001	PELAKSANA PEMBUKUAN		26
27 FIRMAN HIDAYAT NIP.19711005 199302 1 010	PELAKSANA PERBENDAHARAAN	27	
28 SOFYAN ARIYANTO NIP.19810323 200701 1 019	PELAKSANA ANGGARAN		28
29 REZKY MAULIDA, SE NIP.19911007 202012 2 007	PENATA LAPORAN KEUANGAN	29	
30 FITRI NORKOMARIAH YUSTIN, S.Ak NIP.19940615 202012 2 014	PENATA KEUANGAN		30
31 RIDA AHYANI, SE NIP.19940815 202012 2 005	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	31	
32 MUHAMMAD ZAINI, A.Md.Ak NIP.19970920 202012 1 007	VERIFIKATOR KEUANGAN		32
33 ALI NAPARIN	Tenaga Kontrak	33	
34 BAYU SAPUTRA, S. KOM	Tenaga Kontrak		34
35 IKHWANUR RAHMAN, S.Kom, M.Eng	Tenaga Kontrak	35	
36 MUHAMMAD ADAM, SE	Tenaga Kontrak		36
37 RAHMAN	Tenaga Kontrak	37	
38 TASKIA ALYA AZZAHRA	Tenaga Kontrak		38
39 SRI RAHAYU	Tenaga Kontrak	39	
40 RODY ADENAN	Tenaga Kontrak		40
41 YUSENI	Tenaga Kontrak	41	
42 AULIYAH, SE	Tenaga Kontrak		42
43 RIFQI AKHYAD	Tenaga Kontrak	43	
44 MUHAMMAD ZAINI	Tenaga Kontrak		44
45 AHMAD MAULIDI KURNIAWAN	Tenaga Kontrak	45	
46 AHMAD REZKI TAUFAN FIRDAUS	Tenaga Kontrak		46
47 M. IKHSAN NUR RIZKY	Tenaga Kontrak	47	
48 AMELYA	Tenaga Kontrak		48
49 MUHAMMAD MUJAHIDIN	Tenaga Kontrak	49	
50 M.RIZKI ADITYA ANWAR, S.M	Tenaga Kontrak		50
51 ARIF RAHMAN, S.Kom	Tenaga Kontrak	51	
53 MUHAMMAD BURHANUDDIN	Tenaga Kontrak		52
53 NAJAMUDDIN AZHARI	Tenaga Kontrak	53	

PEMBUAT DOKUMEN,

AHMAD MAULIDI KURNIAWAN

NOTULEN RAPAT

1. Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Bulanan.
2. Hari / Tgl : Kamis / 28-Juli-2022
3. Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
4. Tempat : Aula BKAD Kab. Tapin
5. Peserta : Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) BKAD Kabupaten Tapin.

Isi Notulen :

Rapat di hadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) BKAD Kabupaten Tapin.

Rapat di laksanakan di Aula Kantor BKAD Tapin, dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan semua bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin (BKAD).

Kepala Badan mengingatkan kembali kepada semua Bidang untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rapat berlangsung dengan lancar dan kondusif, dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Pembuat laporan.



Abdul Razak, S.Kom



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEY PER-TRIWULAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV															
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		14 = 12		15 = 13		16					
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	%	11.955.806.232	25	%	722.498.986	50	%	3.657.518.855	75	%	7.662.255.582			75,00	%	7.662.255.582	75,00	64,09	75,00	%	7.662.255.582	75,00	64,09	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12	Bulan	30.345.000	3	Bulan	3.940.000	6	Bulan	11.444.300	9	Bulan	17.754.300			9,00	Bulan	17.754.300	75,00	58,51	9,00	Bulan	17.754.300	75,00	58,51	Sekretaris
		5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1.800.000	3	Dokumen	0	3	Dokumen	-	5	Dokumen	799.800			5	Dokumen	799.800	83,33	44,43	5	Dokumen	799.800	83,33	44,43	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
		5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	28.545.000	4	Dokumen	3.940.000	5	Dokumen	11.444.300	6	Dokumen	16.954.500			6	Dokumen	16.954.500	85,71	59,40	6	Dokumen	16.954.500	85,71	59,40	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	84,52	51,91										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	T	R										
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.477.667.352	25	%	433.798.826	60	%	2.109.021.018	70	%	4.400.018.769			70,00	%	4.400.018.769	70,00	67,93	70,00	%	4.400.018.769	70,00	67,93	Sekretaris
		5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.440.813.352	3	Bulan	429.037.726	6	Bulan	2.093.835.418	9	Bulan	4.378.553.169			9	Bulan	4.378.553.169	75,00	67,98	9	Bulan	4.378.553.169	75,00	67,98	Kasubag Keuangan
		5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	3.809.000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	2.704.500	1	Dokumen	2.704.500			1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	Kasubag Keuangan
		5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Dokumen	33.045.000	4	Dokumen	4.761.100	5	Dokumen	12.481.100	12	Dokumen	18.761.100			12	Dokumen	18.761.100	75,00	56,77	12	Dokumen	18.761.100	75,00	56,77	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	83,33	65,25										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	T	R										
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	54.094.450	0	%	0	100	%	35.927.900	100	%	49.400.900			100,00	%	49.400.900	100,00	91,32	100,00	%	49.400.900	100,00	91,32	Kabid Perbendaharaan
		5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	1	Kegiatan	54.094.450	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	35.927.900	1	Kegiatan	49.400.900			1	Kegiatan	49.400.900	100,00	91,32	1	Kegiatan	49.400.900	100,00	91,32	Kasubid Perbendaharaan I
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	100,00	91,32										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	ST	ST										
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.882.342.940	25	%	200.053.409	50	%	1.173.700.324	75	%	2.097.666.057			75,00	%	2.097.666.057	75,00	72,78	75,00	%	2.097.666.057	75,00	72,78	Sekretaris
		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	124.993.340	3	Bulan	500.000	6	Bulan	2.448.000	9	Bulan	93.109.600			9	Bulan	93.109.600	75,00	74,49	9	Bulan	93.109.600	75,00	74,49	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	902.231.800	3	Bulan	0	6	Bulan	468.959.905	9	Bulan	716.551.205			9	Bulan	716.551.205	75,00	79,42	9	Bulan	716.551.205	75,00	79,42	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	10.028.600	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	1.374.000			9	Bulan	1.374.000	75,00	13,70	9	Bulan	1.374.000	75,00	13,70	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	220.157.200	3	Bulan	16.695.000	6	Bulan	45.026.125	9	Bulan	134.033.225			9	Bulan	134.033.225	75,00	60,88	9	Bulan	134.033.225	75,00	60,88	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	99.258.000	3	Bulan	1.599.300	6	Bulan	14.247.200	9	Bulan	41.760.100			9	Bulan	41.760.100	75,00	42,07	9	Bulan	41.760.100	75,00	42,07	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12	Bulan	38.581.000	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	-			9	Bulan	-	75,00	0,00	9	Bulan	-	75,00	0,00	Kasubag Umum & Kepegawaian
		5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Bulan	40.103.000	3	Bulan	7.370.000	6	Bulan	9.305.000	9	Bulan	27.580.000			9	Bulan	27.580.000	75,00	68,77	9	Bulan	27.580.000	75,00	68,77	Kasubag Umum & Kepegawaian

		5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.446.990.000	3	Bulan	173.889.109	6	Bulan	633.714.094	9	Bulan	1.083.257.927				9	Bulan	1.083.257.927	75,00	74,86	9	Bulan	1.083.257.927	75,00	74,86	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	75,00	51,78																										
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	S	R																										
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100	%	942.436.800	0	%	0	0	%	0	50	%	491.350.000				50,00	%	491.350.000	50,00	52,14	50,00	%	491.350.000	50,00	52,14	Sekretaris																					
		5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Unit	942.436.800	0	Unit	0	0	Unit	0	30	Unit	491.350.000				30	Unit	491.350.000	50,00	52,14	30	Unit	491.350.000	50,00	52,14	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	50,00	52,14																										
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	SR	R																										
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	836.823.040	25	%	59.106.751	50	%	188.718.113	75	%	355.063.956				75,00	%	355.063.956	75,00	42,43	75,00	%	355.063.956	75,00	42,43	Sekretaris																					
		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	8.120.000	3	Bulan	0	6	Bulan	1.500.000	9	Bulan	5.000.000				9	Bulan	5.000.000	75,00	61,58	9	Bulan	5.000.000	75,00	61,58	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
		5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	365.080.000	3	Bulan	31.709.090	6	Bulan	104.631.459	9	Bulan	186.100.755				9	Bulan	186.100.755	75,00	50,98	9	Bulan	186.100.755	75,00	50,98	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
		5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	463.623.040	3	Bulan	27.397.661	6	Bulan	82.586.654	9	Bulan	163.963.201				9	Bulan	163.963.201	75,00	35,37	9	Bulan	163.963.201	75,00	35,37	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	75,00	49,31																										
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	S	SR																										
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	732.096.650	25	%	25.600.000	50	%	138.707.200	75	%	251.001.600				75,00	%	251.001.600	75,00	34,29	75,00	%	251.001.600	75,00	34,29	Sekretaris																					
		5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	84.209.150	3	Bulan	20.100.000	6	Bulan	29.149.700	9	Bulan	49.805.600				9	Bulan	49.805.600	75,00	59,15	9	Bulan	49.805.600	75,00	59,15	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
		5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	37.470.000	3	Bulan	3.500.000	6	Bulan	5.800.000	9	Bulan	13.355.000				9	Bulan	13.355.000	75,00	35,64	9	Bulan	13.355.000	75,00	35,64	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
		5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	610.417.500	3	Bulan	2.000.000	6	Bulan	103.757.500	9	Bulan	187.841.000				9	Bulan	187.841.000	75,00	30,77	9	Bulan	187.841.000	75,00	30,77	Kasubag Umum & Kepegawaian																					
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	75,00	41,85																										
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	S	SR																										
																						Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	74,29	59,91																										
																						Predikat Kinerja Kegiatan	S	R																										
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12	%	2.219.200.800	0	%	63.890.006	0	%	510.172.600	0	%	818.687.900				0,00	%	818.687.900	0,00	36,89	0,00	%	818.687.900	0,00	36,89																						
			Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	%		0	%		0	%		0	%					0,00	%		0,00		0,00	%		0,00																							
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	%		100	%		100	%		100	%					100	%		100,00		100,00	%		100,00																							
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97	Nilai		0	Nilai		0	Nilai		0	Nilai					0,00	Nilai		0,00		0,00	Nilai		0,00																							
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	1.152.042.600	25	%	29.390.000	50	%	344.830.000	50	%	434.030.000				50,00	%	434.030.000	50,00	37,67	50,00	%	434.030.000	50,00	37,67	Kabid Anggaran																					
		5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	Dokumen	72.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	14.900.000				2	Dokumen	14.900.000	100,00	20,69	2	Dokumen	14.900.000	100,00	20,69	Kasubid Anggaran III																					
		5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	69.800.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	22.900.000				2	Dokumen	22.900.000	100,00	32,81	2	Dokumen	22.900.000	100,00	32,81	Kasubid Anggaran III																					
		5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58	Dokumen	9.020.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	Dokumen	-				0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran I																					

		5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-P SKPD yang disusun	58	Dokumen	8.980.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		58	Dokumen	-			58	Dokumen	-	100,00	0,00	58	Dokumen	-	100,00	0,00	Kasubid Anggaran II																		
		5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58	Dokumen	36.230.000	0	Dokumen	12.740.000	0	Dokumen	36.195.000	0	Dokumen	36.195.000	0	Dokumen	36.195.000	0,00	99,90	0	Dokumen	36.195.000	0,00	99,90	Kasubid Anggaran I																				
		5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	58	Dokumen	36.270.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-			0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Anggaran II																		
		5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	442.332.600	0	Dokumen	6.650.000	0	Dokumen	49.700.000	0	Dokumen	86.100.000	0	Dokumen	86.100.000	0,00	19,46	0	Dokumen	86.100.000	0,00	19,46	Kasubid Anggaran I																				
		5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD-P yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	140.510.100	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	-			2	Dokumen	-	50,00	0,00	2	Dokumen	-	50,00	0,00	Kasubid Anggaran II																		
		5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	4	Dokumen	336.899.900	0	Dokumen	10.000.000	0	Dokumen	258.935.000	4	Dokumen	273.935.000	4	Dokumen	273.935.000	100,00	81,31	4	Dokumen	273.935.000	100,00	81,31	Kasubid Anggaran I																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			50,00	28,24																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR																										
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kejadian komplain	100	%	699.464.000	25	%	29.500.000	50	%	111.828.500	75	%	271.878.500			75	%	271.878.500	75,00	38,87	75,00	%	271.878.500	75,00	38,87	Kabid Perbendaharaan																		
		5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi bank	12	Laporan	78.020.000	3	Laporan	0	6	Laporan	13.000.000	9	Laporan	25.800.000			9	Laporan	25.800.000	75,00	33,07	9	Laporan	25.800.000	75,00	33,07	Kasubid Perbendaharaan II																		
		5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	4	Triwulan	43.212.000	1	Triwulan	5.500.000	2	Triwulan	14.168.500	3	Triwulan	22.418.500			3	Triwulan	22.418.500	75,00	51,88	3	Triwulan	22.418.500	75,00	51,88	Kasubid Perbendaharaan I																		
		5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Koordinasi Pembiayaan Daerah	1	Kegiatan	15.100.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	-			0	Kegiatan	-	0,00	0,00	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	Kasubid Perbendaharaan III																		
		5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan DAK dan DID	46	Dokumen	43.440.000	30	Dokumen	0	32	Dokumen	9.800.000	32	Dokumen	30.600.000			32	Dokumen	30.600.000	69,57	70,44	32	Dokumen	30.600.000	69,57	70,44	Kasubid Perbendaharaan II																		
		5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Keuangan Tahunan PDAM, BPR, Bank Kelsel	3	Dokumen	35.100.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	25.000.000			0	Dokumen	25.000.000	0,00	71,23	0	Dokumen	25.000.000	0,00	71,23	Kasubid Perbendaharaan III																		
		5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	12	Bulan	81.152.000	3	Bulan	0	6	Bulan	533.100	9	Bulan	533.100			9	Bulan	533.100	75,00	0,66	9	Bulan	533.100	75,00	0,66	Kasubid Perbendaharaan I																		
		5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah sisur Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen	156.560.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	9.626.000	0	Dokumen	66.826.000			0	Dokumen	66.826.000	0,00	42,68	0	Dokumen	66.826.000	0,00	42,68	Kasubid Perbendaharaan II																		
			Jumlah Perda dan Perbub Pengelolaan Keuangan	2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen				0	Dokumen		0	Dokumen	0,00	0,00		0	Dokumen		0,00	0,00	0	Dokumen	0,00	0,00												
			Jumlah Perbub Pembayaran Gaji 13 & THR	2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen				0	Dokumen		0	Dokumen	0,00	0,00		0	Dokumen		0,00	0,00	0	Dokumen	0,00	0,00												
			Jumlah SOP Perpajakan	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen				0	Dokumen		0	Dokumen	0,00	0,00		0	Dokumen		0,00	0,00	0	Dokumen	0,00	0,00												
			Jumlah SK pengelolaan keuangan daerah	40	Dokumen		16	Dokumen		25	Dokumen		25	Dokumen				25	Dokumen		25	Dokumen	25	Dokumen		25	Dokumen		25	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen										
		5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	12	Bulan	246.880.000	3	Bulan	24.000.000	6	Bulan	64.700.900	6	Bulan	100.700.900			6	Bulan	100.700.900	50,00	40,79	6	Bulan	100.700.900	50,00	40,79	Kasubid Perbendaharaan I																		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			31,32	38,84																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR																										
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	367.694.200	25	%	5.000.006	50	%	53.514.100	75	%	112.779.400			75,00	%	112.779.400	75,00	30,67	75,00	%	112.779.400	75,00	30,67	Kabid Akuntansi & Pelaporan																		

		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Daerah	12	Bulan	52.250.000	3	Bulan	5.000.000	6	Bulan	16.070.000	9	Bulan	27.526.700				9	Bulan	27.526.700	75,00	52,68	9	Bulan	27.526.700	75,00	52,68	Kasubid Pembukuan																				
			Waktu Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan SKPD	12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		9	Bulan					9	Bulan																													
		5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Waktu Kompilasi Laporan Keuangan BLUD, JKN, dan BOS	12	Bulan	38.750.000	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	1.914.000				9	Bulan	1.914.000	75,00	4,94	9	Bulan	1.914.000	75,00	4,94	Kasubid Pelaporan Keuangan																				
		5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	Dokumen	22.823.600	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2.426.900	3	Dokumen	9.483.300				3	Dokumen	9.483.300	100,00	41,55	3	Dokumen	9.483.300	100,00	41,55	Kasubid Evaluasi & Pertanggungjawaban APBD																				
			Waktu Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Bulan		0	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		-	100,00	3	Bulan	-				3	Bulan	-					100,00																		
			Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi keuangan SKPD	9	Laporan		9	Laporan		9	Laporan		3	Berkas		3	Berkas	9	Laporan	-					Laporan	-																							
			Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	3	Berkas		0	Berkas		3	Berkas		3	Berkas		-				3	Berkas	-				Berkas	-																						
		5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	6	Bulan	37.050.000	3	Bulan	0	6	Bulan	35.017.200	6	Bulan	35.017.200				6	Bulan	35.017.200	100,00	94,51	6	Bulan	35.017.200	100,00	94,51	Kabid Akuntansi & Pelaporan																				
		5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda dan rancangan perbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.345.600	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	34.154.200				2	Dokumen	34.154.200	100,00	56,60	2	Dokumen	34.154.200	100,00	56,60	Kabid Akuntansi & Pelaporan																				
		5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	1	Dokumen	61.050.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-				0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																				
		5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdu akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	1	Dokumen	62.300.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.684.000				0	Dokumen	4.684.000	0,00	7,52	0	Dokumen	4.684.000	0,00	7,52	Kasubid Pembukuan																				
		5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12	Bulan	33.125.000	3	Bulan	6	0	Bulan	-	9	Bulan	-				9	Bulan	-	75,00	0,00	9	Bulan	-	75,00	0,00	Kasubid Pelaporan Keuangan																				
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		69,44	32,23																									
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		S	SR																									
																					Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		66,67	35,74																									
																					Predikat Kinerja Kegiatan		S	SR																									
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100	%	964.069.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500	0	%	656.896.521				0,00	%	656.896.521	0,00	68,14	0,00	%	656.896.521	0,00	68,14																					
		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	%	964.069.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500	0	%	656.896.521				0,00	%	656.896.521	0,00	68,14	0,00	%	656.896.521	0,00	68,14	Kabid Pengelolaan BMD																				
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100	%		0	%		0	%		0	%		0,00	%	0,00	%																														
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	95	%		0	%		0	%		0	%		0,00	%	0,00	%																														
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100	%		0	%		0	%		0	%		0,00	%	0,00	%																														
		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1	Dokumen	246.175.000	0	Dokumen	59.865.200	1	Dokumen	184.680.200	1	Dokumen	225.420.200				1	Dokumen	225.420.200	100,00	91,57	1	Dokumen	225.420.200	100,00	91,57	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																				
		5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar BMD	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-				0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																				

	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPMBMD	2	Dokumen	25.893.900	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12	Bulan	59.380.000	3	Bulan	4.000.000	6	Bulan	15.225.000	9	Bulan	37.042.000	9	Bulan	37.042.000	75,00	62,38	9	Bulan	37.042.000	75,00	62,38	Kasubid Penatausahaan
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12	Bulan	1.722.900	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	-	9	Bulan	-	75,00	0,00	9	Bulan	-	75,00	0,00	Kasubid Penatausahaan
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12	Bulan	34.507.000	3	Bulan	0	6	Bulan	200.000	9	Bulan	9.275.000	9	Bulan	9.275.000	75,00	26,88	9	Bulan	9.275.000	75,00	26,88	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1	Kegiatan	112.185.900	0	Kegiatan	0		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100	%	277.581.400	25	%	48.526.200	50	%	102.784.200	75	%	197.959.600	75	%	197.959.600	75,00	71,32	75	%	197.959.600	75,00	71,32	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90	Laporan	35.781.400	45	Laporan	8.250.000	45	Laporan	10.053.000	90	Laporan	27.559.200	90	Laporan	27.559.200	100,00	77,02	90	Laporan	27.559.200	100,00	77,02	Kasubid Penatausahaan
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24	Laporan	15.780.000	0	Laporan	0	12	Laporan	6.746.100	12	Laporan	6.746.100	12	Laporan	6.746.100	50,00	42,75	12	Laporan	6.746.100	50,00	42,75	Kasubid Penatausahaan
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1	Kegiatan	155.062.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	152.894.421	1	Kegiatan	152.894.421	100,00	98,60	1	Kegiatan	152.894.421	100,00	98,60	Kasubid Penatausahaan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		59,09	42,77							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		R	SR							
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0,00	68,14							
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	S							
Jumlah Anggaran dan						15.139.076.532			907.030.392			4.487.379.955			9.137.840.003			907.030.392					9.137.840.003			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																		33,33	56,37							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																		SR	R							



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

Undangan
Rapat Koordinasi Persiapan
Pelantikan Sekda

Rantau 21 Januari 2023

Kepada Yth ;
Sekretaris, Kabid dan
Kasubbid, Kasubag Serta Staf
BKAD Kab. Tapin Tapin

Di -
Tempat.

Dalam Rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Sekda Kabupaten Tapin sehubungan dengan tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 26 Januari 2023
Waktu : 10.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula BKAD Kab. Tapin.

Demikian kami sampaikan surat undangan ini. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.









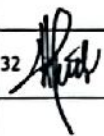











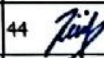
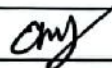








Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin,



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

hari/Tanggal Kamis, 26 Januari 2023
Jam/Pukul 10.00 siang s/d selesai

No	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. SUFIANSYAH, M.AP NIP.19700616 199003 1 002	KEPALA BADAN	1	
2	HARIS FADHILAH, SE, MM NIP.19740626 200501 1 005	SEKRETARIS		2
3	MUHAMMAD ANSHARY, S.SOS NIP.19731020 200604 1 016	KABID. PERBENDAHARAAN	3	
4	H. SUPIAN NOOR, S.IP NIP.19741110 199403 1 012	KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4
5	M.RIDHORIYADI..F, SE.AK, MM NIP.19850622 201001 1 017	KABID. ANGGARAN	5	
6	MISRY KHAULANY, SE. NIP.19730623 200501 1 011	KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN		6
7	DANIEL RAHMATULLAH, SKM NIP.19860809 201001 1 011	KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN	7	
8	ABDUL RAZAQ, S.KOM NIP.19740604 200904 1 003	KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN		8
9	HENDRA YATMIKA, S.KOM NIP.19750606 200501 1 015	KASUBID. PERBENDAHARAAN I	9	
10	M. RIZQI MAULANA, SE. NIP.19870114 201001 1 007	KASUBID. PERBENDAHARAAN II		10
11	EMERZI HABIBA, SE NIP.19821116 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	11	
12	AGUS RONNYADI, S. Kom. NIP.19760828 200501 1 012	KASUBID. PEMBUKUAN		12
13	RAHMALINDA, SE NIP.19861204 201503 2 001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	13	
14	IKA MAYASARI, ST. NIP.19860226 201503 2 002	ANALIS KEBIJAKAN		14
15	AHMAT RAPITN, S.Kom NIP.19790906 200904 1 003	KASUBID. PENATAUSAHAAN	15	
16	FITRI ROLYANI, S.AP, MM NIP.19820723 200701 2 005	KASUBID. PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN		16
17	JONI ANSYARI, S. Kom, MM NIP.19740616 200501 1 011	KASUBID. ANGGARAN I	17	
18	ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19760903 200012 1 006	KASUBID. ANGGARAN II		18
19	SURIANSYAH, SE NIP.19760123 201001 1 014	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	19	
20	FIRMAN HIDAYAT NIP.19711005 199302 1 010	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		20
21	ANJAR GUSTI DKS, S.M NIP.19801203 200604 2 001	PELAKSANA PERBENDAHARAAN	21	
22	ADAM KHAIRUN, S.T NIP.198708292015031002	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH		22
23	ADRIANSYAH, A. Md NIP.19780921 200904 1 001	PELAKSANA KEUANGAN	23	

	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
	RUSLIANA, A.Md NIP.19830805 200901 2 002	PELAKSANA PERBENDAHARAAN		24 
25	ERMA SUSANTI, A.Md NIP.19880115 201503 2 001	PELAKSANA PEMBUKUAN		25 
26	MIFTAHURRAHMAH, S.Ak NIP.19900402 201503 2 003	PELAKSANA PELAPORAN KEUANGAN		26 
27	SOFYAN ARIYANTO NIP.19810323 200701 1 019	PELAKSANA ANGGARAN		27 
28	REZKY MAULIDA, SE NIP.19911007 202012 2 007	PENATA LAPORAN KEUANGAN		28 
29	FITRI NORKOMARIAH YUSTIN, S.Ak NIP.19940615 202012 2 014	PENATA KEUANGAN		29 
30	RIDA AHYANI, SE NIP.19940815 202012 2 005	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		30 
31	MUHAMMAD ZAINI, A.Md.Ak NIP.19970920 202012 1 007	VERIFIKATOR KEUANGAN		31 
32	NETTY HERAWATI, SE NIP.19820918 200701 2 006	ANALIS PERBENDAHARAAN		32 
33	ALI NAPARIN	PTT		33 
34	BAYU SAPUTRA, S. KOM	PTT		34 
35	IKHWANUR RAHMAN, S.Kom, M.Eng	PTT		35 
36	MUHAMMAD ADAM, SE	PTT		36 
37	RAHMAN	PTT		37 
38	TASKIA ALYA AZZAHRA	PTT		38 
39	SRI RAHAYU	PTT		39 
40	RODY ADENAN	PTT		40 
41	YUSENI	PTT		41 
42	AULIYAH, SE	PTT		42 
43	RIFQI AKHYAD	PTT		43 
44	MUHAMMAD ZAINI	PTT		44 
45	AHMAD MAULIDI KURNIAWAN	PTT		45 
46	AHMAD REZKI TAUFAN FIRDAUS	PTT		46 
47	M. IKHSAN NUR RIZKY	PTT		47 
48	AMELYA	PTT		48 
49	MUHAMMAD MUJAHIDIN	PTT		49 
50	M.RIZKI ADITYA ANWAR, S.M	PTT		50 
51	ARIF RAHMAN, S.Kom	PTT		51 
52	MUHAMMAD BURHANUDDIN	PTT		52 
53	NAJAMUDDIN AZHARI	PTT		53 

	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
	ANITA	PTT		54 <i>Anita</i>
55	AFIFAH HASANAH	PTT		55 <i>Affah</i>
56	MUHAMMAD RIZKI ASWANDI	PTT		56
57	TSANA NAFISAH RIDHA	PTT		57 <i>Tsana</i>
58	MUHAMMAD RUSNI	PTT		58
59	KHAIRUL SALEH	PTT		59 <i>Khairul</i>
60	NOOR SYARIDA	PTT		60 <i>Noor</i>
61	MUHAMMAD MAULIDURRASYID	PTT		61 <i>Maulid</i>
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

PEMBUAT DOKUMEN,

Maulid
MUHAMMAD MAULIDURRASYID



NOTULEN RAPAT

1. Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Sekda Kabupaten Tapin
2. Hari / Tgl : Kamis / 26-Januari-2023
3. Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
4. Tempat : Aula BKAD Kab. Tapin
5. Peserta : Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Tenaga Kontrak BKAD Tapin.

Isi Notulen :

Rapat di hadir oleh Kepala Badan, Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Para Kasubag, Staf dan Tenaga Kontrak BKAD Tapin.

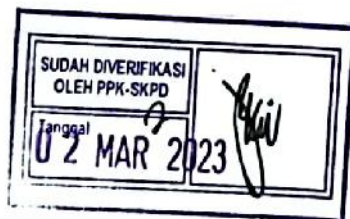
Rapat dilaksanakan di Aula Kantor BKAD Tapin, Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Sekda Kabupaten Tapin

Sekretaris BKAD Haris Fadhilahn menyampaikan kepada semua jajaran PNS BKAD Tapin untuk turut serta dadan berkoordinasi serta membantu segala kelancaran kegiatan Pelantikan Sekda Kabupaten Tapin yang kebetulan di Jabat oleh Bp. H. Sufiansyah yang merupakan mantan Kepala BKAD Tapin

Sekretaris BKAD Menginstruksikan kepada semua PNS BKAD untuk bisa membantu pelaksanaan kegiatan tersebut

Rapat berlangsung dengan lancar dan kondusif, dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Pembuat laporan,



Abdul Razak, S.Kom

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEY PER-TRIWULAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab			
					I		II		III		IV																
					7		8		9		10														11		12
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	%	12.046.066.843	25	%	722.498.986	50	%	3.657.518.855	75	%	7.662.255.582	100	%	11.229.457.016	100,00	%	11.229.457.016	100,00	93,22	100,00	%	11.229.457.016	100,00	93,22	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12	Bulan	30.345.000	3	Bulan	3.940.000	6	Bulan	11.444.300	9	Bulan	17.754.300	12	Bulan	29.976.900	12,00	Bulan	29.976.900	100,00	98,79	12,00	Bulan	29.976.900	100,00	98,79	Sekretaris
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1.800.000	3	Dokumen	0	3	Dokumen	-	5	Dokumen	799.800	6	Dokumen	1.796.400	6	Dokumen	1.796.400	100,00	99,80	6	Dokumen	1.796.400	100,00	99,80	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	28.545.000	4	Dokumen	3.940.000	5	Dokumen	11.444.300	6	Dokumen	16.954.500	7	Dokumen	28.180.500	7	Dokumen	28.180.500	100,00	98,72	7	Dokumen	28.180.500	100,00	98,72	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			100,00	99,26							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	ST							
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.477.847.963	25	%	433.798.826	60	%	2.109.021.018	70	%	4.400.018.769	100	%	6.095.885.845	100,00	%	6.095.885.845	100,00	94,10	100,00	%	6.095.885.845	100,00	94,10	Sekretaris
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.440.993.963	3	Bulan	429.037.726	6	Bulan	2.093.835.418	9	Bulan	4.378.553.169	12	Bulan	6.060.617.745	12	Bulan	6.060.617.745	100,00	94,09	12	Bulan	6.060.617.745	100,00	94,09	Kasubag Keuangan
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	3.809.000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	2.704.500	1	Dokumen	2.704.500	1	Dokumen	2.704.500	1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	1	Dokumen	2.704.500	100,00	71,00	Kasubag Keuangan
5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Dokumen	33.045.000	4	Dokumen	4.761.100	5	Dokumen	12.481.100	12	Dokumen	18.761.100	16	Dokumen	32.563.600	16	Dokumen	32.563.600	100,00	98,54	16	Dokumen	32.563.600	100,00	98,54	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			100,00	87,88							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	T							
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	54.094.450	0	%	0	100	%	35.927.900	100	%	49.400.900	100	%	49.400.900	100	%	49.400.900	100,00	91,32	100,00	%	49.400.900	100,00	91,32	Kabid Perbendaharaan
5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	1	Kegiatan	54.094.450	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	35.927.900	1	Kegiatan	49.400.900	1	Kegiatan	49.400.900	1	Kegiatan	49.400.900	100,00	91,32	1	Kegiatan	49.400.900	100,00	91,32	Kasubid Perbendaharaan I
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			100,00	91,32							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	ST							
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100	%	3.050.573.540	25	%	200.053.409	50	%	1.173.700.324	75	%	2.097.666.057	100	%	2.891.294.430	100,00	%	2.891.294.430	100,00	94,78	100,00	%	2.891.294.430	100,00	94,78	Sekretaris
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	124.993.340	3	Bulan	500.000	6	Bulan	2.448.000	9	Bulan	93.109.600	12	Bulan	124.916.600	12	Bulan	124.916.600	100,00	99,94	12	Bulan	124.916.600	100,00	99,94	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	902.231.800	3	Bulan	0	6	Bulan	468.959.905	9	Bulan	716.551.205	12	Bulan	888.007.905	12	Bulan	888.007.905	100,00	98,42	12	Bulan	888.007.905	100,00	98,42	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	10.028.600	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	1.374.000	12	Bulan	10.028.600	12	Bulan	10.028.600	100,00	100,00	12	Bulan	10.028.600	100,00	100,00	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	235.757.200	3	Bulan	16.695.000	6	Bulan	45.026.125	9	Bulan	134.033.225	12	Bulan	215.510.625	12	Bulan	215.510.625	100,00	91,41	12	Bulan	215.510.625	100,00	91,41	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	101.248.600	3	Bulan	1.599.300	6	Bulan	14.247.200	9	Bulan	41.760.100	12	Bulan	101.121.000	12	Bulan	101.121.000	100,00	99,87	12	Bulan	101.121.000	100,00	99,87	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12	Bulan	6.191.000	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	-	12	Bulan	4.102.500	12	Bulan	4.102.500	100,00	66,27	12	Bulan	4.102.500	100,00	66,27	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Bulan	58.853.000	3	Bulan	7.370.000	6	Bulan	9.305.000	9	Bulan	27.580.000	12	Bulan	53.130.000	12	Bulan	53.130.000	100,00	90,28	12	Bulan	53.130.000	100,00	90,28	Kasubag Umum & Kepegawaian

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.611.270.000	3	Bulan	173.889.109	6	Bulan	633.714.094	9	Bulan	1.083.257.927	12	Bulan	1.494.477.200	12	Bulan	1.494.477.200	100,00	92,75	12	Bulan	1.494.477.200	100,00	92,75	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00	92,37																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	ST																										
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100	%	937.416.200	0	%	0	0	%	0	33	%	491.350.000	100	%	924.378.800	100,00	%	924.378.800	100,00	98,61	100,00	%	924.378.800	100,00	98,61	Sekretaris																				
5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90	Unit	937.416.200	0	Unit	0	0	Unit	0	30	Unit	491.350.000	90	Unit	924.378.800	90	Unit	924.378.800	100,00	98,61	90	Unit	924.378.800	100,00	98,61	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00	98,61																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	ST																										
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	836.823.040	25	%	59.106.751	50	%	188.718.113	75	%	355.063.956	100	%	648.971.341	100,00	%	648.971.341	100,00	77,55	100,00	%	648.971.341	100,00	77,55	Sekretaris																				
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	8.120.000	3	Bulan	0	6	Bulan	1.500.000	9	Bulan	5.000.000	12	Bulan	8.100.000	12	Bulan	8.100.000	100,00	99,75	12	Bulan	8.100.000	100,00	99,75	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	365.080.000	3	Bulan	31.709.090	6	Bulan	104.631.459	9	Bulan	186.100.755	12	Bulan	337.061.593	12	Bulan	337.061.593	100,00	92,33	12	Bulan	337.061.593	100,00	92,33	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	463.623.040	3	Bulan	27.397.661	6	Bulan	82.586.654	9	Bulan	163.963.201	12	Bulan	303.809.748	12	Bulan	303.809.748	100,00	65,53	12	Bulan	303.809.748	100,00	65,53	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00	85,87																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	T																										
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	658.966.650	25	%	25.600.000	50	%	138.707.200	75	%	251.001.600	100	%	589.548.800	100,00	%	589.548.800	100,00	89,47	100,00	%	589.548.800	100,00	89,47	Sekretaris																				
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	84.209.150	3	Bulan	20.100.000	6	Bulan	29.149.700	9	Bulan	49.805.600	12	Bulan	78.037.900	12	Bulan	78.037.900	100,00	92,67	12	Bulan	78.037.900	100,00	92,67	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	60.620.000	3	Bulan	3.500.000	6	Bulan	5.800.000	9	Bulan	13.355.000	12	Bulan	47.310.000	12	Bulan	47.310.000	100,00	78,04	12	Bulan	47.310.000	100,00	78,04	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	514.137.500	3	Bulan	2.000.000	6	Bulan	103.757.500	9	Bulan	187.841.000	12	Bulan	464.200.900	12	Bulan	464.200.900	100,00	90,29	12	Bulan	464.200.900	100,00	90,29	Kasubag Umum & Kepegawaian																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00	87,00																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	T																										
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100,00	92,09																										
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST																										
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12	%	2.005.916.800	0	%	63.890.006	0	%	510.172.600	0	%	818.687.900	32,69	%	1.624.028.700	32,69	%	1.624.028.700	272,42	80,96	32,69	%	1.624.028.700	272,42	80,96																					
	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	%		0	%		0	%		0	%		100	%		100,00	%		100,00		100,00	%		100,00																						
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100,00	%		100,00		100,00	%		100,00																						
	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	97	Nilai		0	Nilai		0	Nilai		0	Nilai		83,51	Nilai		83,51	Nilai		86,09		83,51	Nilai		86,09																						
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	963.508.600	25	%	29.390.000	50	%	344.830.000	50	%	434.030.000	100	%	896.254.300	100,00	%	896.254.300	100,00	93,02	100,00	%	896.254.300	100,00	93,02	Kabid Anggaran																				
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	Dokumen	66.660.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	14.900.000	2	Dokumen	63.355.000	2	Dokumen	63.355.000	100,00	95,04	2	Dokumen	63.355.000	100,00	95,04	Kasubid Anggaran III																				
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	58.500.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		2	Dokumen	22.900.000	2	Dokumen	57.390.000	2	Dokumen	57.390.000	100,00	98,10	2	Dokumen	57.390.000	100,00	98,10	Kasubid Anggaran III																				
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58	Dokumen	9.020.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	Dokumen	-	58	Dokumen	9.005.000	58	Dokumen	9.005.000	100,00	99,83	58	Dokumen	9.005.000	100,00	99,83	Kasubid Anggaran I																				

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-P SKPD yang disusun	58	Dokumen	7.740.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	58	Dokumen	-	58	Dokumen	7.440.000	58	Dokumen	7.440.000	100,00	96,12	58	Dokumen	7.440.000	100,00	96,12	Kasubid Anggaran II	
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58	Dokumen	36.230.000	0	Dokumen	12.740.000	0	Dokumen	36.195.000	0	Dokumen	36.195.000	58	Dokumen	36.195.000	58	Dokumen	36.195.000	100,00	99,90	58	Dokumen	36.195.000	100,00	99,90	Kasubid Anggaran I
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	58	Dokumen	34.990.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	58	Dokumen	34.184.000	58	Dokumen	34.184.000	100,00	97,70	58	Dokumen	34.184.000	100,00	97,70	Kasubid Anggaran II
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	253.602.600	0	Dokumen	6.650.000	0	Dokumen	49.700.000	0	Dokumen	86.100.000	4	Dokumen	199.492.000	4	Dokumen	199.492.000	100,00	78,66	4	Dokumen	199.492.000	100,00	78,66	Kasubid Anggaran I
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD-P yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	137.830.100	0	Dokumen	0	0	Dokumen	2	Dokumen	-	4	Dokumen	130.969.500	4	Dokumen	130.969.500	100,00	95,02	4	Dokumen	130.969.500	100,00	95,02	Kasubid Anggaran II	
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	4	Dokumen	358.935.900	0	Dokumen	10.000.000	0	Dokumen	258.935.000	4	Dokumen	273.935.000	4	Dokumen	358.223.800	4	Dokumen	358.223.800	100,00	99,80	4	Dokumen	358.223.800	100,00	99,80	Kasubid Anggaran I
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			100,00	95,58							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	ST							
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kejadian komplain	100	%	699.464.000	25	%	29.500.000	50	%	111.828.500	75	%	271.878.500	100	%	465.635.900	100	%	465.635.900	100,00	66,57	100,00	%	465.635.900	100,00	66,57	Kabid Perbendaharaan
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi bank	12	Laporan	78.020.000	3	Laporan	0	6	Laporan	13.000.000	9	Laporan	25.800.000	12	Laporan	69.125.000	12	Laporan	69.125.000	100,00	88,60	12	Laporan	69.125.000	100,00	88,60	Kasubid Perbendaharaan II
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	4	Triwulan	43.212.000	1	Triwulan	5.500.000	2	Triwulan	14.168.500	3	Triwulan	22.418.500	4	Triwulan	33.418.500	4	Triwulan	33.418.500	100,00	77,34	4	Triwulan	33.418.500	100,00	77,34	Kasubid Perbendaharaan I
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Koordinasi Pembiayaan Daerah	1	Kegiatan	15.100.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	13.242.400	1	Kegiatan	13.242.400	100,00	87,70	1	Kegiatan	13.242.400	100,00	87,70	Kasubid Perbendaharaan III
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan DAK dan DID	50	Dokumen	43.440.000	30	Dokumen	0	32	Dokumen	9.800.000	32	Dokumen	30.600.000	113	Dokumen	33.830.000	113	Dokumen	33.830.000	226,00	77,88	113	Dokumen	33.830.000	226,00	77,88	Kasubid Perbendaharaan II
5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Keuangan Tahunan PDAM, BPR, Bank Kelsel	3	Dokumen	35.100.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	25.000.000	3	Dokumen	27.100.000	3	Dokumen	27.100.000	100,00	77,21	3	Dokumen	27.100.000	100,00	77,21	Kasubid Perbendaharaan III
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12	Bulan	81.152.000	3	Bulan	0	6	Bulan	533.100	9	Bulan	533.100	12	Bulan	533.100	12	Bulan	533.100	100,00	0,66	12	Bulan	533.100	100,00	0,66	Kasubid Perbendaharaan I
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah sidur Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen	156.560.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	9.626.000	0	Dokumen	66.826.000	1	Dokumen	139.686.000	1	Dokumen	139.686.000	100,00	89,22	1	Dokumen	139.686.000	100,00	89,22	Kasubid Perbendaharaan II
	Jumlah Perbub Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		100,00			1		100,00					
	Jumlah Perbub Pembayaran Gaji 13 & THR	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		100,00			1		100,00					
	Jumlah SOP Perpajakan	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		100,00			1		100,00					
	Jumlah SK pengelolaan keuangan daerah	40	Dokumen		17	Dokumen		27	Dokumen		44	Dokumen		44	Dokumen		110,00			44		110,00					
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	12	Bulan	246.880.000	3	Bulan	24.000.000	6	Bulan	64.700.900	6	Bulan	100.700.900	12	Bulan	148.700.900	12	Bulan	148.700.900	100,00	60,23	12	Bulan	148.700.900	100,00	60,23	Kasubid Perbendaharaan I
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			111,33	69,85							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			0	S							
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	342.944.200	25	%	5.000.006	50	%	53.514.100	75	%	112.779.400	100	%	262.138.500	100,00	%	262.138.500	100,00	76,44	100,00	%	262.138.500	100,00	76,44	Kabid Akuntansi & Pelaporan

5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Daerah	12	Bulan	52.250.000	3	Bulan	5.000.000	6	Bulan	16.070.000	9	Bulan	27.526.700	12	Bulan	51.730.700	12	Bulan	51.730.700	100,00	99,01	12	Bulan	51.730.700	100,00	99,01	Kasubid Pembukuan																			
	Waktu Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan SKPD	12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		9	Bulan		12	Bulan		12	Bulan																												
5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Waktu Kompilasi Laporan Keuangan BLUD, JKN, dan BOS	12	Bulan	14.000.000	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	1.914.000	12	Bulan	11.544.000	12	Bulan	11.544.000	100,00	82,46	12	Bulan	11.544.000	100,00	82,46	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	Dokumen	22.823.600	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2.426.900	3	Dokumen	9.483.300	3	Dokumen	19.662.600	3	Dokumen	19.662.600	100,00	86,15	3	Dokumen	19.662.600	100,00	86,15	Kasubid Evaluasi & Pertanggungjawaban APBD																			
	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Bulan		0	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		-	100,00																												
	Jumlah Laporan analisis data rekonsiliasi laporan Mutasi keuangan SKPD	9	Laporan		9	Laporan		9	Laporan		9	Laporan		9	Laporan		-											Laporan																		
	Jumlah data lampiran-lampiran terkait ranperda dan ranperbub pelaksanaan APBD	3	Berkas		0	Berkas		3	Berkas		3	Berkas		3	Berkas		-											Berkas																		
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	6	Bulan	37.050.000	3	Bulan	0	6	Bulan	35.017.200	6	Bulan	35.017.200	12	Bulan	35.017.200	12	Bulan	35.017.200	200,00	94,51	12	Bulan	35.017.200	200,00	94,51	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda dan rancangan perbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.345.600	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	34.154.200	2	Dokumen	59.825.000	2	Dokumen	59.825.000	100,00	99,14	2	Dokumen	59.825.000	100,00	99,14	Kabid Akuntansi & Pelaporan																			
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	1	Dokumen	61.050.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	53.244.000	1	Dokumen	53.244.000	100,00	87,21	1	Dokumen	53.244.000	100,00	87,21	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sidur akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	1	Dokumen	62.300.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.684.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pembukuan																			
5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12	Bulan	33.125.000	3	Bulan	6	0	Bulan	-	9	Bulan	-	12	Bulan	31.115.000	12	Bulan	31.115.000	100,00	93,93	12	Bulan	31.115.000	100,00	93,93	Kasubid Pelaporan Keuangan																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00	80,30																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	T																									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100,00	78,68																									
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T																									
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100	%	942.769.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500	0	%	656.896.521	98,08	%	893.240.121	98,08	%	893.240.121	98,08	94,75	98,08	%	893.240.121	98,08	94,75																				
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	%	942.769.500	0	%	120.641.400	0	%	319.688.500	0	%	656.896.521	100	%	893.240.121	100,00	%	893.240.121	100,00	94,75	100,00	%	893.240.121	100,00	94,75	Kabid Pengelolaan BMD																			
	Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100	%		0	%		0	%		92,30	%		92,30	%		92,30	%		92,30																										
	Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	95	%		0	%		0	%		100	%		100,00	%		105,26	%		105,26																										
	Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100	%		0	%		0	%		100	%		100,00	%		100,00	%		100,00																										
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1	Dokumen	241.375.000	0	Dokumen	59.865.200	1	Dokumen	184.680.200	1	Dokumen	225.420.200	1	Dokumen	238.085.200	1	Dokumen	238.085.200	100,00	98,64	1	Dokumen	238.085.200	100,00	98,64	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																			
5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar BMD	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																			

5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2	Dokumen	42.393.900	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	38.238.900	2	Dokumen	38.238.900	100,00	90,20	2	Dokumen	38.238.900	100,00	90,20	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																			
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12	Bulan	75.880.000	3	Bulan	4.000.000	6	Bulan	15.225.000	9	Bulan	37.042.000	12	Bulan	63.442.000	12	Bulan	63.442.000	100,00	83,61	12	Bulan	63.442.000	100,00	83,61	Kasubid Penatausahaan																			
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12	Bulan	1.722.900	3	Bulan	0	6	Bulan	-	9	Bulan	-	12	Bulan	1.714.800	12	Bulan	1.714.800	100,00	99,53	12	Bulan	1.714.800	100,00	99,53	Kasubid Penatausahaan																			
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12	Bulan	49.907.000	3	Bulan	0	6	Bulan	200.000	9	Bulan	9.275.000	12	Bulan	40.005.000	12	Bulan	40.005.000	100,00	80,16	12	Bulan	40.005.000	100,00	80,16	Kasubid Pemeliharaan & Pengamanan																			
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan																			
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100	%	314.967.300	25	%	48.526.200	50	%	102.784.200	75	%	197.959.600	100	%	301.631.000	100	%	301.631.000	100,00	95,77	100	%	301.631.000	100,00	95,77	Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan																			
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90	Laporan	45.681.400	45	Laporan	8.250.000	45	Laporan	10.053.000	90	Laporan	27.559.200	90	Laporan	43.679.200	90	Laporan	43.679.200	100,00	95,62	90	Laporan	43.679.200	100,00	95,62	Kasubid Penatausahaan																			
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24	Laporan	15.780.000	0	Laporan	0	12	Laporan	6.746.100	12	Laporan	6.746.100	24	Laporan	13.549.600	24	Laporan	13.549.600	100,00	85,87	24	Laporan	13.549.600	100,00	85,87	Kasubid Penatausahaan																			
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1	Kegiatan	155.062.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	152.894.421	1	Kegiatan	152.894.421	1	Kegiatan	152.894.421	100,00	98,60	1	Kegiatan	152.894.421	100,00	98,60	Kasubid Penatausahaan																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				81,82	75,27																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				T	S																									
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				98,08	94,75																									
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST																									
Jumlah Anggaran dan		14.994.753.143			907.030.392				4.487.379.955			9.137.840.003			13.746.725.837			907.030.392					9.137.840.003																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				112,57	89,64																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																				ST	T																									